



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH LAMPUNG

Jalan Terusan Ryacudu No. 1 Lampung Selatan 35365 Lampung Selatan, 14 Agustus 2023

Nomor : B/3141/VIII/REN.4.1.6./2023

Klasifikasi: BIASA

Lampiran : -

Perihal : Mengirimkan Renja  
Polda Lampung T.A. 2024.

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Di

Jakarta

u. p. Asrena

1. Rujukan :
  - a. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1132/V/2020 Tanggal 29 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Polri Tahun 2020-2024;
  - c. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/II/2022 tanggal 15 Februari 2023 tentang Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2024;
  - d. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/146/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Lampung tahun 2020-2024 (Perubahan);
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal Renja Polda Lampung Tahun Anggaran 2024 (terlampir).
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Irwasum Polri.
2. Distribusi A, B dan C Polda Lampung.





# RENCANA KERJA

## POLDA LAMPUNG

2024

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG  
NOMOR : KEP/ 392 /VII/2023, TANGGAL 03 JULI 2023



# RENCANA KERJA

## POLDA LAMPUNG

2024

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG  
NOMOR : KEP/ 392 /VII/2023, TANGGAL 03 JULI 2023



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Nomor: Kep/ 392 /VII/2023

tentang

RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Kepolisian Daerah Lampung Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;  
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;  
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;  
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;  
9. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1240/IX/2022 tanggal 19 September 2022 tentang Perubahan Atas Sebagian Isi Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1132/V/2020 Tanggal 29 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

10. Surat ...

10. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/2/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2024;
11. Keputus Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/845/VI/2023 tentang Kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Operasional Tahun 2024;
12. Keputusan Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/146/II/2023, tanggal 15 Februari 2023 tentang Perubahan Sebagian Isi Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/464/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Lampung Tahun 2020-2024.

- Memperhatikan:
1. Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: S-287/MK.02/2023 dan B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 hal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus T.A. 2024;
  2. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3580/V/REN.2.3/2023/Srena tanggal 15 Mei 2022 perihal Pagu Indikatif Polda/Satker T.A. 2024;
  3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG TENTANG RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.
1. Rencana Kerja Kepolisian Daerah Lampung Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing satuan kerja di lingkungan Polda Lampung;
  2. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Lampung Selatan  
pada tanggal: 3 Juli 2023

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



HELM SANTIKA, S.H., S.IK., M.Si.  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A, B dan C Polda Lampung

## DAFTAR ISI

	Halaman
I. Latar Belakang .....	1
1. Kondisi Umum .....	1
a. Perkembangan Aspek Kehidupan .....	4
b. Analisis .....	12
2. Identifikasi Masalah .....	16
II. Tujuan Dan Sasaran .....	25
1. Visi dan Misi .....	25
a. Polri .....	25
b. Polda Lampung.....	25
2. Tujuan Jangka Menengah .....	25
a. Polri.....	25
b. Polda Lampung.....	26
3. Sasaran Prioritas .....	26
a. Polri.....	26
b. Polda Lampung.....	27
III. Arah Kebijakan dan Strategi T.A. 2024.....	29
1. Polri .....	29
2. Polda Lampung.....	32
IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Polda Lampung T.A. 2024.....	53
1. Program dan Kegiatan .....	53
2. Pagu Indikatif Polda Lampung T.A 2024.....	55
3. Kegiatan yang berdasarkan Pagu Indikatif T.A 2024.....	60
V. PENUTUP .....	63

### DAFTAR LAMPIRAN:

- I. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024;
- II. Formulir Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Polda Lampung Tahun Anggaran 2024

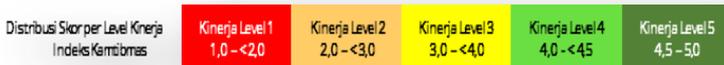
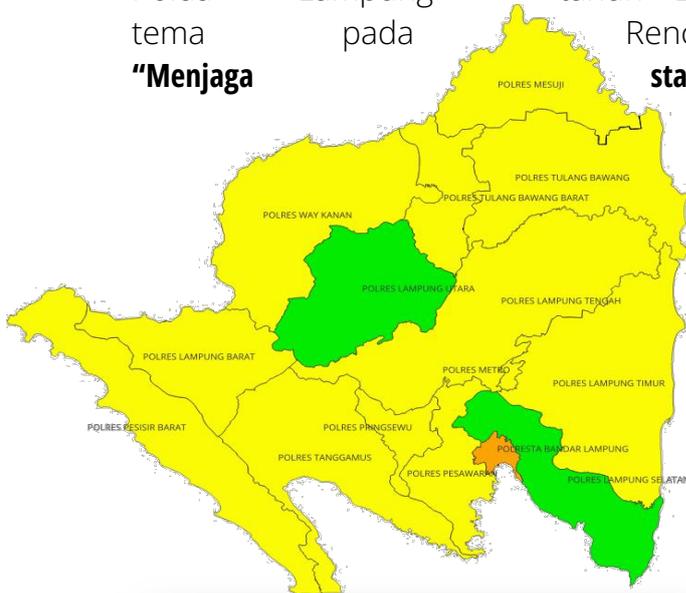


## RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG T.A. 2024

### I. Latar Belakang.

#### 1. Kondisi Umum.

Tahun 2024 merupakan tahun ke-lima dari tahapan Rencana Strategis Polda Lampung Tahun 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Polda Lampung Tahun 2023. Oleh karena itu Rencana Kerja Polda Lampung tahun 2024 masih menjadi bagian dari penjabaran Rencana Strategis Polda Lampung tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tema pada Rencana Kerja Polri tahun 2024 yaitu **“Menjaga stabilitas kamtibmas dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**.



**Gambar 1.** Sebaran kinerja indeks kamtibmas T.A. 2022 2021

Hal ini sudah menjadi tanggung jawab Polda Lampung untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Polri secara utuh, sebagai representasi institusi Polri di kewilayahan, yang harus mampu menjadi *trigger mechanism* dalam mengelola kamtibmas. Demikian juga mengandung muatan bahwa pilar keamanan dalam negeri, pilar pertahanan, pilar keamanan laut dan pilar kamtibmas serta pilar keamanan siber saat ini menjadi sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan, termasuk menciptakan situasi yang kondusif pada penyelenggaraan agenda Pemilu 2024.

Selanjutnya apabila memandang hasil pelaksanaan tugas Polda Lampung tahun 2022, maka tingkat keberhasilan kinerjanya cukup signifikan,

ditandai dengan fakta sebaran kinerja **indeks kamtibmas**<sup>1</sup> pada Polres jajaran. Secara umum apabila melihat Gambar 1 tersebut di atas, maka secara umum daerah hukum Polda Lampung berwarna kuning, hal ini menunjukkan level kinerja 3, artinya indeks kamtibmas pada 15 Polres tersebut berada pada kisaran angka indeks 3,0-4,0 (*skala likert 1-5*). Di samping itu terlihat Polres Lampung Utara dan Lampung Selatan sudah mencapai kinerja level 4. Sementara itu Polresta Bandar Lampung berada pada spektrum warna oranye/nila, yang menunjukkan level kinerja antara level 2-3.

Pengukuran indeks kamtibmas ini berdasarkan capaian kinerja dari dua dimensi yaitu dimensi **indeks pemeliharaan kamtibmas**<sup>2</sup>, yang didalamnya terdapat delapan variabel, masing-masing; *road safety index, index comunity policing*, kegiatan patroli, kegiatan harkamtibmas perairan, tingkat kualitas penanggulangan keamanan berkadar tinggi, pelayanan pengamanan obvit, produk intelijen yang ditindaklanjuti dan *crime rate*.

Tahun 2022 kinerja indeks harkamtibmas, sebagai mana terlihat pada Gambar 2, daerah hukum Polda Lampung terdapat delapan Polres berwarna kuning, menunjukkan kinerja harkamtibmas pada level 3, kemudian terdapat empat Polres berwarna hijau muda dengan kinerja level 4 yaitu Polres Lampung Selatan, Pringsewu, Lampung Utara dan Tulang Bawang. Sedangkan Polres Pesawaran berada pada kinerja level 2 dan Polresta Bandar Lampung pada kinerja level 1.



**Gambar 2.** Sebaran kinerja indeks harkamtibmas T.A. 2022.

Selanjutnya tinjauan indeks kamtibmas lainnya adalah dimensi **indeks penegakan hukum**<sup>3</sup>, yang tersusun atas enam variabel pembentuknya, yaitu persentase penyelesaian tindak pidana konvensional, transnasional, kekayaan negara, kontijensi, persentase penyelesaian kasus laka lintas dan

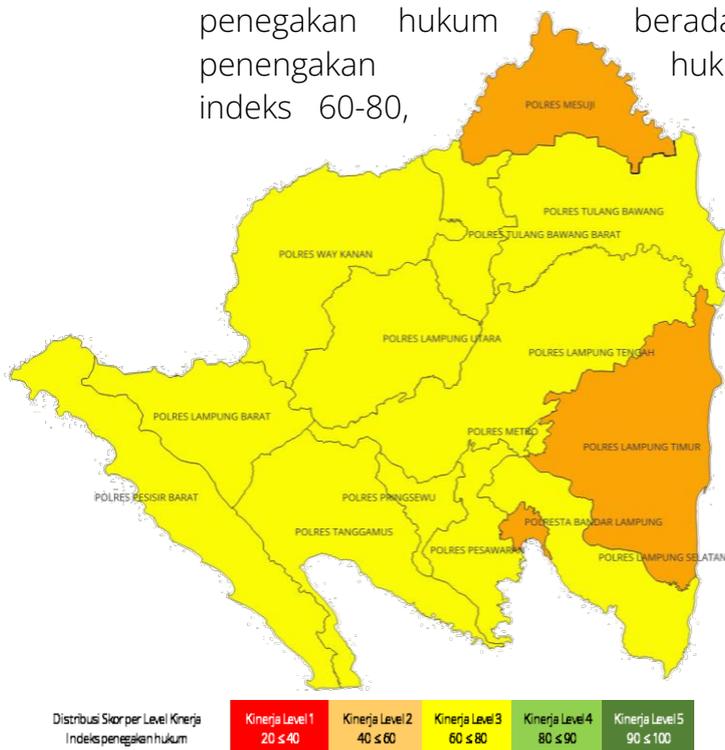
<sup>1</sup> **Indeks kamtibmas** merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja institusi Polri secara komprehensif dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat yang tersusun atas dimensi indeks harkamtibmas dan dimensi indeks penegakan hukum (berdasarkan Kep. Kapolri Nomor: Kep/1910/IX/2020 tanggal 24 September 2020).

<sup>2</sup> **Indeks harkamtibmas** merupakan indikator yang mengukur kinerja Polri dalam melakukan upaya pemeliharaan kamtibmas serta pencegahan terjadinya tindak kejahatan yang tersusun atas delapan komponen masing-masing *road safety index, Index comunity policing*, kegiatan patroli, kegiatan harkamtibmas perairan, tingkat kualitas penanggulangan keamanan berkadar tinggi, pelayanan pengamanan obvit, produk intelijen yang ditindaklanjuti dan *crime rate*.

<sup>3</sup> **Indeks penegakan hukum** merupakan indikator untuk mengukur kinerja Polri dalam menyelesaikan suatu tindak kejahatan, dengan enam variabel pembentuknya yaitu persentase penyelesaian tindak pidana konvensional, transnasional, kekayaan negara kontijensi, perkara laka lintas, tindak pidana perairan

persentase penyelesaian tindak pidana perairan. Hasil sebaran kinerja indeks penegakan hukum tahun 2022 secara umum berada pada kinerja level 3-4 (skala likert 1-100) atau tepatnya nilai indeks kinerja 89,18.

Untuk sebaran indeks penegakan hukum Polres jajaran, terlihat daerah hukum Polda Lampung didominasi warna kuning, hal ini menunjukkan kinerja penegakan hukum berada pada kinerja level 3, artinya indeks penegakan hukum rata-rata berada pada interval angka



Gambar 3. Sebaran kinerja indeks penegakan hukum T.A. 2022

hampir pada semua Polres jajaran Polda Lampung. Kecuali daerah hukum Polresta Bandar Lampung, Polres Mesuji dan Lampung Timur berwarna oranye/nila, menunjukkan kinerja level 2 pada internal angka indeks 40-60. Kinerja ini berhubungan dengan pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana dan laka lantas yang dilaksanakan fungsi Reskrim dan fungsi Lantas pada 15 Polres jajaran Polda Lampung. Oleh karena itu secara makro, parameter kondusivitas situasi kamtibmas direpresentasikan melalui Indeks kamtibmas, yang menggambarkan dinamika kegiatan operasional tusi Polri melalui Indeks

harkamtibmas dan indeks penegakan hukum.

Oleh karena itu keberhasilan dalam pengelolaan kamtibmas, secara eksplisit merupakan gambaran kinerja dari seluruh satuan kepolisian Polda Lampung dalam melaksanakan tupoksi harkamtibmas dan penegakan hukum, yang dilakukan melalui kerja keras dan adanya dukungan dari stakeholders, baik dalam bentuk apresiasi maupun saran kritik yang membangun dan penyelenggaraan kerja sama yang selama ini telah dibangun. Selanjutnya keberhasilan dalam pengelolaan kamtibmas ini sampai dengan saat ini menjadi kekuatan bagi Polda Lampung dalam rangka mengimplementasi transformasi menuju Polri yang presisi, mulai dari transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan, guna meningkatkan profesionalisme, kemandirian, transparansi, berkeadilan, tegas dan humanis, sebagai mana yang telah dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, S.IK, M.Si.

Seiring dengan menjalankan transformasi organisasi Polri tersebut, tentunya tantangan dan permasalahan yang dihadapi Polda Lampung pada tahun 2024, tidak lepas dari pengaruh perkembangan lingkungan strategis,

khususnya keadaan dunia saat ini menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung, karena penggunaan teknologi informasi menjadi mudah dan cepat karena tersedianya dan banyaknya *platform* baik media internet maupun media sosial serta penggunaan gaway yang mudah didapat oleh laporan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor utama dalam menstimulasi terjadinya pergeseran nilai yang mempengaruhi identitas dan budaya bangsa, mulai dari pemahaman eksklusifisme, materialisme, konsumerisme, dan hedonisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian juga agenda baik skala lokal, nasional maupun internasional yang ada di depan mata pada tahun 2024, dalam rangka pemerataan pembangunan terutama sektor perekonomian dan pengamanan pemilu 2024. Oleh karena itu untuk mendukung program pembangunan yang dijalankan pemerintahan pusat dan daerah, perlu *supporting* Polda Lampung dengan menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

Adapun perkembangan lingkungan strategi daerah hukum Polda Lampung apabila dilihat dari faktor-faktor ipoleksosbud dan keamanan, maka akan senantiasa bergerak dinamis dan berubah mengikuti perkembangan situasi di wilayah lain baik itu regional, nasional maupun internasional. Semua isu strategis baik global, regional dan nasional maupun lokal, perlu menjadi perhatian dan bahan masukan dalam Renja Polda Lampung T.A. 2024, dengan mengakomodir kepentingan tupoksi Polda Lampung dalam mengelola kamtibmas di provinsi Lampung. Selanjutnya sebagai gambaran umum kondisi eksternal dan internal Polda Lampung, dapat dijelaskan sebagai berikut:

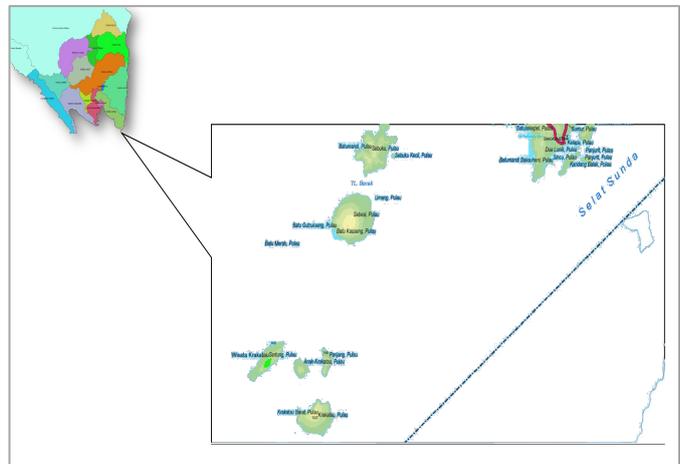
**a. Perkembangan Aspek Kehidupan.**

Isu nasional secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi terhadap perkembangan aspek kehidupan di Provinsi Lampung. Isu lokal yang berkembang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan akurat agar isu yang berkembang dapat diantisipasi melalui perencanaan pengelolaan kamtibmas yang konfrehensif dengan memandang arah kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah yang diselaraskan dengan sumber daya yang dimiliki Polda Lampung. Karena perkembangan lingkungan strategis ini apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak pada situasi nasional, regional dan global, oleh karena itu Polda Lampung dan jajaran dituntut untuk mempunyai kemampuan untuk mendeteksi dan memetakan secara dini terhadap kerawanan yang mungkin timbul dan menyusun solusi dalam mereduksi serta menangani gangguan kamtibmas yang bersumber dari aspek astagatra:

**1) Geografi.**

Letak geografi Provinsi Lampung dibatasi oleh sebagian besar wilayah lautan (Laut Jawa, Selat Sunda dan Samudera Hindia), dengan luas daratan 33.570,264 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 1.185 km. Letak geografis ini menjadi strategis karena menjadi pintu gerbang bagi keluar/masuk transportasi baik orang, barang dan jasa dari dan ke Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, melalui pelabuhan penyeberangan laut (Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya). Oleh karena itu letak geografis ini berpotensi menjadi peluang terjadinya berbagai bentuk kerawanan kamtibmas.

Selain itu daerah hukum Polda Lampung terletak pada *ring of fire*, karena terdapat gunung Anak Krakatau (GAK) yang aktif yang pada saatnya akan menjadi ancaman dan bencana tsunami akibat adanya



**Gambar 5. Potensi bencana alam letusan GAK.**

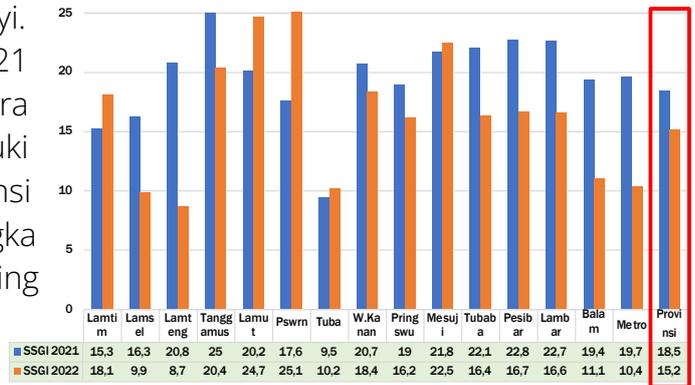
pergeseran lempeng bumi yakni pergerakan lempeng Indo-Australia yang menyusup di bawah lempeng Eurasia.

**2) Demografi.**

Jumlah penduduk daerah Lampung hasil SP tahun 2020 tercatat sebanyak 9.001.000 jiwa, yang berdasarkan jenis kelamin; laki-laki sekitar 51,25% dan perempuan 48,75%, komposisi ini cukup berimbang yang tersebar pada 15 kabupaten/kota. Sedangkan berdasarkan golongan usia dibagi tiga masing-masing usia muda (6–14 thn) 23,74%; usia produktif (15–64 thn) 70,31% dan usia tua > 64 thn adalah 5,95%. Dengan luas wilayah Provinsi Lampung sebesar 34,62 ribu km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk sekitar 260 jiwa/km<sup>2</sup> dan laju pertumbuhan selama sepuluh tahun terakhir ini 2010-2020 sebesar 1,65%. Hasil SP2020 tercatat kepadatan penduduk Provinsi Lampung meningkat dari hasil SP2010 sebesar 192 jiwa per km<sup>2</sup>, hal ini mengalami peningkatan meskipun pertumbuhannya cenderung

melambat dari waktu ke waktu.<sup>4</sup> Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak saat ini adalah Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebanyak 1,46 juta jiwa atau sekitar 16,21% dibandingkan dengan penduduk Provinsi Lampung.

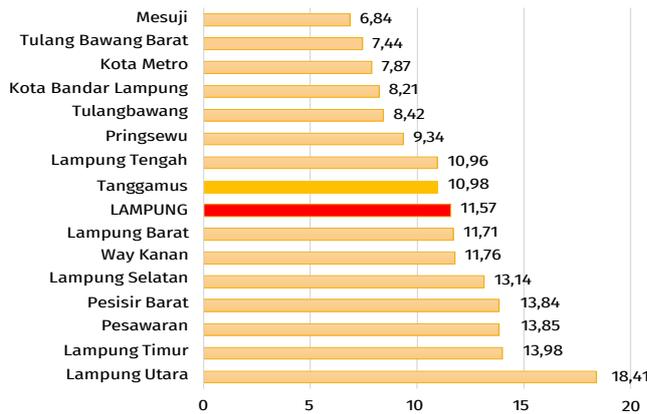
Pertumbuhan penduduk ini akan berkaitan dengan jumlah kelahiran bayi, maka kelahiran bayi ini akan berhubungan dengan kesehatan bayi. Pada tahun 2021 Lampung secara nasional menduduki lima besar Provinsi dengan angka prevalensi stunting terendah.



Gambar 6. Prevalensi stunting kab/kota

Kemudian tahun 2022 menjadi tiga besar Provinsi dengan angka prevalensi stunting terendah. Menurut catatan Bappeda Provinsi Lampung, bahwa trend

penurunan prevalensi stunting Provinsi, diharapkan tahun berikutnya dapat mencapai target penurunan stunting nasional sebesar 14%, bahkan lebih rendah. Tetapi apabila dilihat dari prevalensi kabupaten/Kota, maka terdapat lima Kabupaten yang prevalensi stuntingnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu **Kab. Lampung Timur, Lampung Utara, Pesawaran, Mesuji dan Tulungagung**.

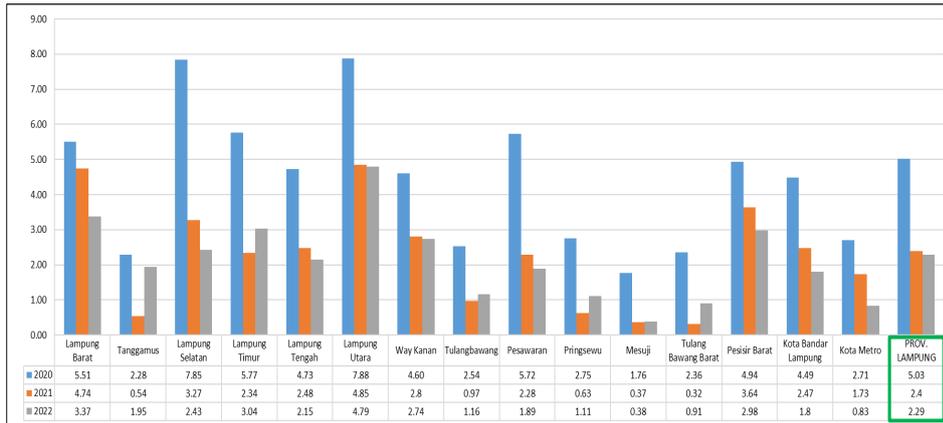


Gambar 7. Kemiskinan kabupaten/kota di provinsi 2022

Hal ini dapat dipastikan bahwa pada kabupaten tersebut kesehatan bayi menurun atau terdapat gangguan dalam tumbuh kembangnya, terutama disebabkan kekurangan gizi karena rendahnya pendapat keluarga.

Selanjutnya menyangkut implemmentasi dari percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menyangkut Inpres No. 4 Tahun 2022, berdasarkan gambar 8 di bawah ini, tercatat data pengentasan kemiskinan ekstrem Provinsi Lampung sebesar 2,29% turun signifikan dibandingkan dengan tahun 2020 yang berada pada angka 5,03%. Terdapat 3 (tiga) kabupaten tertinggi angka kemiskinan ekstremnya, yaitu Lampung Utara (4,79%), Lampung

<sup>4</sup> BPS 2022, Analisis profil penduduk provinsi Lampung, hal, 18.



**Gambar 8. Kemiskinan ekstrim kabupaten/kota di provinsi 2022**

Barat (3,37%) dan Lampung Timur (3,04%) sedangkan kabupaten dengan angka kemiskinan terendah adalah kabupaten Mesuji (0,38%). Hal menjadi pekerjaan utama pada tahun 2024 Polda

Lampung untuk

mendukung kondusivitas terhadap pemerintahan daerah baik provinsi dan Kab/Kota dalam melaksanakan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan.

### 3) Sumber daya alam.

Di wilayah Provinsi Lampung berdasarkan hasil penelitian ditengarai memiliki potensi bermacam-macam sumber daya alam yang belum *diexplore*, di antara adalah minyak bumi, uranium, batuan muda (*brown coal*), mineral besi, emas, pasir kwarsa dan perak serta sumber air panas dan gas bumi.

Sedangkan sumber daya alam lainnya yaitu hasil hutan sampai dengan tahun 2022 telah banyak mengalami kerusakan dan berubah fungsi menjadi areal pertanian, perkebunan dan pemukiman, bahkan dijumpai kasus-kasus yang bersumber dari masalah hutan, seperti sengketa lahan, perambahan hutan, pembalakan liar dan lain-lain. Berdasarkan data BPS terhadap komoditas dominan di provinsi Lampung adalah sektor perkebunan<sup>5</sup>.

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah	Komoditas yang diusahakan
1.	Tanggamus	2	Karet, Kakao
2.	Lampung Selatan	3	Kelapa Sawit, Karet
3.	Lampung Tengah	7	Kelapa Sawit, Tebu
4.	Lampung Utara	9	Kelapa Sawit, Tebu
5.	Way Kanan	12	Kelapa Sawit, Karet, Tebu
6.	Tulang Bawang	8	Kelapa Sawit, Tebu
7.	Pesawaran	2	Karet
8.	Mesuji	9	Kelapa Sawit, Karet
9.	Tulang Bawang Barat	3	Karet, Kelapa Sawit
10.	Pesisir Barat	1	Kelapa Sawit
	<b>LAMPUNG</b>	<b>56</b>	

**Tabel 1. Jumlah perusahaan perkebunan tahun 2022**

### 4) Ideologi.

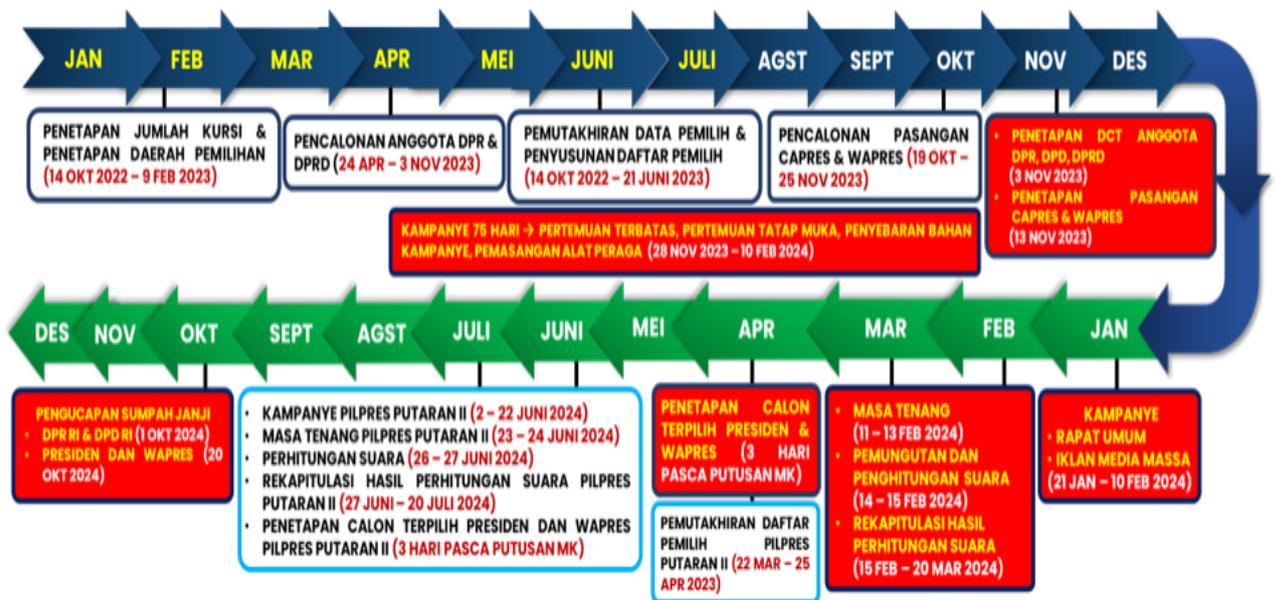
Secara formal dan pada umumnya masyarakat Lampung telah menyadari bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah negara, namun seiring dengan perkembangan

<sup>5</sup> Sumber BPS 2021, Direktori Perusahaan Perkebunan Provinsi Lampung 2021 hal. 4.

lingkungan strategis terdapat indikasi adanya degradasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini tampak dari masih adanya sebagian kecil masyarakat Lampung yang beraliran fundamentalis berlatar agama dan berfaham radikal. Juga tidak kalah pentingnya adanya sinyalemen dan upaya menghidupkan kembali ideologi komunisme seolah-olah mengedepankan kepentingan rakyat dan kaum miskin.

**5) Politik**

a) Tahun 2024 merupakan tahun politik, terdapat tahapan pemilihan presiden dan legislatif, ditambah lagi menjelang akhir tahunnya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tentunya tahapan yang telah disusun harus sesuai dengan dengan rencana sebagaimana tahapan dan jadwal dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Sehingga Polda Lampung dan jajaran perlu memberikan atensi terhadap kegiatan kampanye, penanganan terhadap pelanggaran/kejahatan pemilu, rekrutmen anggota KPUD yang bermasalah, menyikapi gejolak akibat hasil pemilu, pengajuan gugatan PPHU/perselisihan hasil pemungutan suara ke mahkamah konstitusi. Adapun alur tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 sebagai berikut:



Gambar 9. Tahapan dan jadwal Pemilu 2024

b) Terdapat konstelasi politik, tercatat wajah-wajah baru pimpinan Parpol di provinsi Lampung yang diperoleh hasil musyawarah konferensi daerah, yang dianggap sebagai suatu momentum aktualisasi diri dari tokoh parpol dalam rangka

pemenangan dalam pemilu, sehingga meningkatkan suhu politik partai. Pada Pemilu tahun 2024 ini bermunculan beberapa partai baru, yang tentunya menjadi alternatif dalam pemilihan kali ini. Adapun parpol peserta pemilu 2024 di Provinsi Lampung sebagai berikut:

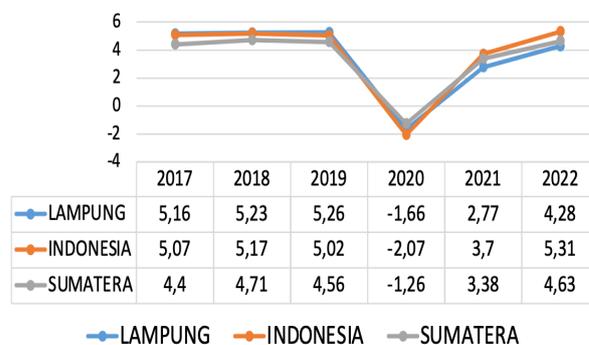
NO URUT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	24
PARPOL																		
SEBARAN	15 Kab / Kota	13 Kab / Kota	12 Kab / Kota	15 Kab / Kota	12 Kab / Kota	12 Kab / Kota	12 Kab / Kota	15 Kab / Kota	13 Kab / Kota	15 Kab / Kota	11 Kab / Kota	11 Kab / Kota	15 Kab / Kota	14 Kab / Kota				

Gambar 10. Parpol peserta Pemilu di provinsi Lampung 2024

- c) Di samping itu setelah terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tersebut, baik eksekutif maupun legislatif, kinerjanya akan langsung menjadi sorotan, terutama gebrakan awal apabila kebijakan yang dijalankan atau peran wakil rakyat dianggap tidak optimal, maka akan menjadi stimulan timbulnya berbagai respon/tanggapan baik kritik, tuntutan dan berlanjut pada tuduhan yang disalurkan pada media yang ada baik online maupun media sosial, yang akhirnya apabila harkamtibmas tidak dikelola dengan baik, maka menjadi gerakan massa untuk mengakhiri pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif, .
- d) Terdapat wacana usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB), yang akan terus mengemuka terutama di kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Utara dan Kab. Lampung Selatan, hal ini akan menjadi amunisi bagi parpol dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap parpol tertentu.

6) **Ekonomi**

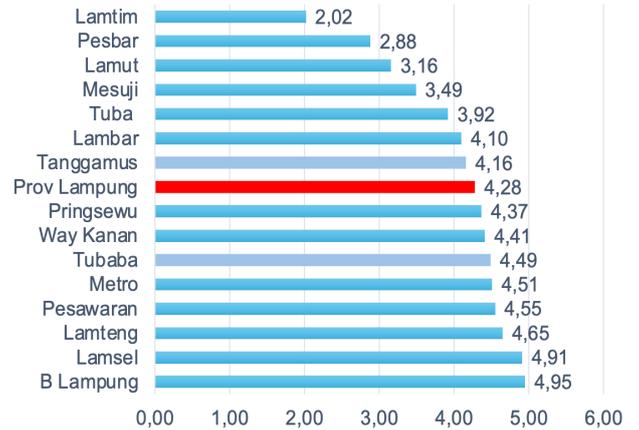
- a) Pasca pandemi Covid-19, perekonomian di provinsi Lampung sampai dengan tahun 2022 tumbuh menguat, meski masih dibawah Nasional dan Sumatera.



Gambar 11. Pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung 2022

Kemudian apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi (*source of growth*), lapangan usaha perdagangan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 1,90%, diikuti lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 1,03%, serta pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,56%;

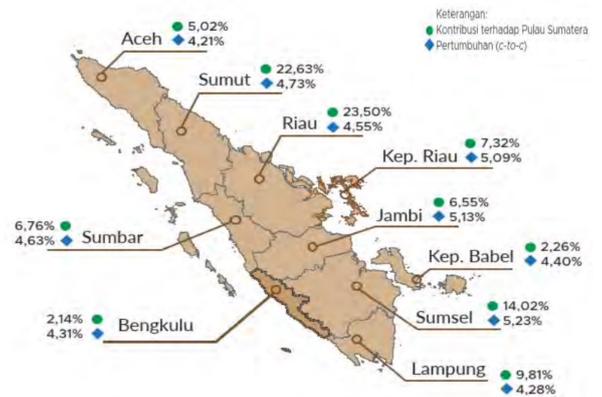
- b) terdapat tiga Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu Kota Bandar Lampung (4.95%), Lampung Selatan (4.91%) dan Lampung Tengah (4.65%). Sedangkan Kab. Lampung Timur menjadi kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah.



**Gambar 12. Pertumbuhan ekonomi kab/kota di provinsi Lampung 2022**

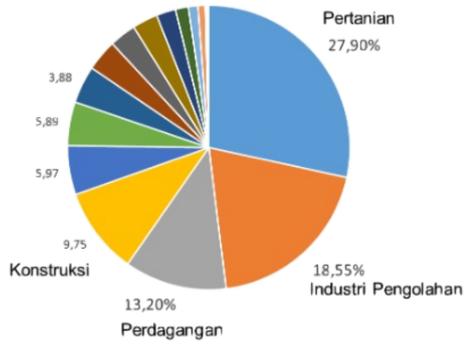
Hal ini menjadi atensi dalam dinamika operasional kepolisian yang dilaksanakan Polda Lampung dan jajaran, untuk menjaga kodusivitas kamtibmas;

- c) *share* PDRB Lampung Se-Sumatera adalah sebesar 9,81%. Menempatkan Provinsi Lampung dengan ekonomi terbesar ke-4 Se-Sumatera setelah Riau, Sumut dan Sumsel;



**Gambar 13. PDRB di Pulau Sumatera tahun 2022**

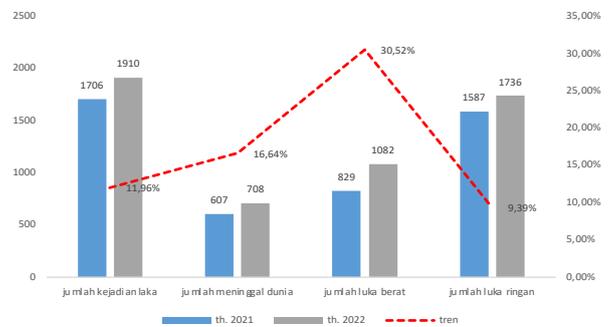
- d) adapun produksi perekonomian yang mempengaruhi terhadap PDRB Provinsi Lampung tahun 2022 adalah didominasi oleh tiga sektor yaitu pertanian 27,90%, diikuti industri pengolahan 18,55% dan perdagangan 13,20%. Adapun PDRB yang didasari atas harga bergerak adalah sebesar Rp.414,13 trilyun dan PDRB berdasarkan atas harga konstan sebesar Rp. 257,50 trilyun dengan pendapatan perkapita penduduknya adalah Rp.45,1 juta. Data tersebut dapat terlihat pada gambar;



Gambar 14. PDRB provinsi Lampung tahun 2022

e) sementara itu laju inflasi di Provinsi Lampung pada tahun 2022 sedikit diatas rentang 2-4 % atau sama dengan nilai inflasi nasional sebesar 5,51%. Adapun tantangan dalam pengendalian Inflasi Tahun 2022 adalah ketidakstabilan geopolitik mancanegara yaitu perang antara negara Rusia vs Ukaraina; kondisi perekonomian global berupa ancaman krisis energi dan krisis pangan; untuk tingkat nasional, pemerintah menghadapi tantangan inflasi berupa dampak dari kenaikan tarif dasar listrik (TDL) di bulan Juli 2022 dan kenaikan harga BBM di bulan September 2022;

f) pembangunan Tol Sumatera disatu sisi memberi dampak positif bagi perekonomian daerah Lampung dan sekitarnya dengan



Gambar 15. Tren kejadian laka lantas

berkembangnya; pembangunan kawasan industri, pelabuhan bongkar muat, pembangunan ekonomi di sepanjang jalur tol dan perkembangan sektor wisata baik wisata laut, alam maupun taman nasional. Keadaan ini belum sebanding dengan bertambahnya jumlah kendaraan, sehingga memungkinkan terjadinya kemacetan, disamping itu kemudahan sarana transportasi ini memberikan peluang bagi terjadinya kejahatan trans nasional khususnya narkoba, kejahatan berdampak kontijensi, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan konvensional. Sementara disisi lain peningkatan hubungan antara wilayah melalui jalan toll, belum dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas jalan reguler baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota yang salah satunya menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Dalam tahun 2022 terdapat tren jumlah kecelakaan lalu lintas meningkat sebesar 11,96%, dan hal ini diikuti pula dengan meningkatnya korban meninggal dunia sebesar 16,64%, luka berat naik 30,52% dan luka ringan naik 9,29%. Secara umum upaya fungsi lalu lintas dalam menciptakan keamanan dan keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas belum

menunjukkan hasil yang signifikan baik dalam menurunkan kejadian laka maupun menurunkan korban laka, terutama korban meninggal dunia;

- g) dampak pembangunan mega proyek yang bersifat lokal yaitu Kota Baru, Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan yang saat ini ini masih mangkrak belum ada tindak lanjut dari Pemda Prov. Lampung, sehingga terjadi penurunan aset daerah secara yang membebani anggaran daerah;
- h) sengketa lahan/tanah yang berlarut-larut yang diakibatkan dari proses penyelesaian dalam tataran preemtif dan preventif oleh aparaturnya yang berkompeten sehingga berdampak pada penegakan hukum yang tidak efektif, maka pada bagian hilir muncul persoalan hukum terjadinya sengketa yang memperebutkan lahan/tanah. Ada pihak yang secara *dejure* merasa berhak, namun ada juga pihak yang secara *defacto* berhak. Maka hal ini berimplikasi pada gangguan kamtibmas yang muncul dan terjadinya pelanggaran hukum. Namun demikian langkah-langkah yang dilakukan Polri dalam membantu instansi terkait menangani sengketa lahan/tanah juga sering dianggap tidak adil dan berpihak kepada kekuatan tertentu, fenomena semacam ini adalah wajar sebagai wujud ekspektasi masyarakat terhadap Polri yang semakin tinggi, khususnya transparansi, akuntabilitas dan perilaku humanis;
- i) perambahan hutan yang terjadi di kawasan hutan TNBBS Lampung Barat – Tanggamus, TNWK Lampung Timur, Reg 38 Gunung Balak Lampung Timur, Register 45 Mesuji, Reg 22 Tanggamus, Reg 44 dan 46 di Way Kanan sesungguhnya sangat memprihatinkan, karena telah melibatkan ribuan perambah dan kerusakan hutan yang luar biasa, bahkan menyebabkan banjir dan tanah longsor serta mempengaruhi perubahan iklim. Seiring dengan waktu lambat laun masalah ini akan menjadi perhatian nasional maupun internasional, oleh pegiat-pegiat lingkungan hidup, dan Polri akan terkena imbasnya, karena dianggap tidak mampu melakukan pencegahan dan penegakan hukum secara konsisten sejak awal, walaupun upaya secara preemtif dan preventif Kemenhut dan pemerintahan daerah memiliki peran yang dominan dalam menegakkan aturan hukum kehutanan.

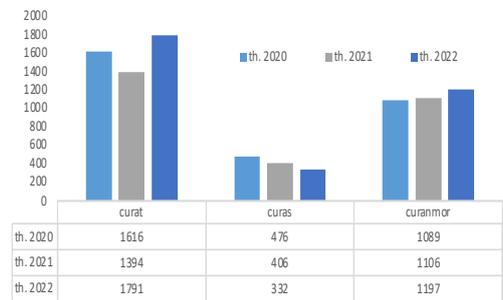
## 7) Sosial budaya

- a) Keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama di provinsi Lampung sejak dahulu kala telah tumbuh dan berkembang turut mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakatnya berbangsa dan bernegara. Keanekaragaman komponen bangsa yang penduduknya mayoritas muslim dipandang sebagai potensi nasional membangun bangsa. Namun sisi lain potensi konflik pemicu disintegrasi dan terjadi intoleransi dapat memecah belah persatuan bangsa (peristiwa konflik Balinuraga, Bekri, Bumiratu Nuban Lampung Tengah, dan penolakan rumah ibadah) pernah mewarnai di wilayah Lampung ini;
- b) Perilaku masyarakat pasca pandemi *Covid-19* menjadi sesuatu yang lumrah apabila ditemukan kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker kesehatan sebagai bentuk suatu kesadaran dalam menjaga kesehatan pribadi dan pemahaman terhadap protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari;
- c) perubahan iklim yang tidak menentu berdampak pada ketahanan pangan dan daya dukung lingkungan yang dapat meruntuhkan daya dukung terhadap keamanan dan ketertiban, mulai dari musim kemarau rentan terhadap kebakaran hutan, lahan dan kebun dan pada musim penghujan mengancam terjadinya tanah longsor pada lokasi-lokasi tertentu di wilayah Kab Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat dan Kab. Tanggamus;
- d) permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, kenakalan remaja, fenomena keberadaan LGBT dan segregasi identitas di masyarakat akan meningkat seiring dengan menurunnya pendapatan masyarakat akibat persaingan tenaga kerja, mudahnya informasi yang didapat yang menimbulkan disorientasi pada tumbuh kembang perilaku anak-anak dan remaja, demikian juga pengaruh asimetris dari informasi media sosial, yang kesemua itu berdampak pada situasi kamtibmas;
- e) masalah tumpang tindihnya kewenangan pusat dan daerah dalam mengelola baik infrastruktur dan sumber daya di wilayah Lampung akan menjadi isu yang dinamis, termasuk perilaku korupsi oleh pejabat pemerintahan masih mungkin terjadi pada proses pembangunan maupun penyelewengan penggunaan anggaran baik pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota sampai ke tingkat desa;

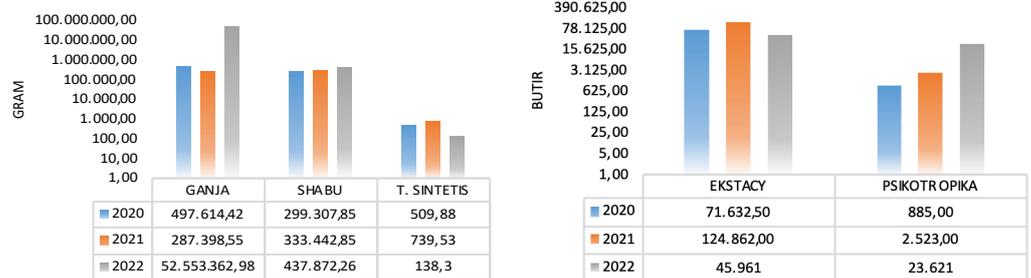
- f) aksi-aksi unjuk rasa yang dipelopori LSM dan mahasiswa dengan mengedepankan kebijakan pemerintahan yang dinilainya kontroversi dan inkonsisten, permasalahan sosial budaya, sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan dan pertentangan kebijakan Pemerintah Daerah, cenderung disertai dengan aksi anarkhis;
- g) perkembangan dinamika masyarakat dari diberlakukannya UU tentang kesehatan, terdapat tanggapan dan reaksi baik pro maupun kontra, hal ini perlu antisipasi dari kegiatan kepolisian di wilayah Lampung.

**8) Keamanan**

- a) peningkatan kejahatan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api atau senjata tajam pada daerah – daerah yang dianggap jauh dari pantauan polisi khususnya pencurian pada lokasi/tempat usaha termasuk juga curas dengan sasaran kendaraan R<sub>2</sub> dan R<sub>4</sub>. Dalam tiga tahun terakhir ini kasus menonjol pencurian dengan pemberatan mengalami kenaikan sebesar 28,4% kasus pencurian kendaraan bermotor naik sebesar 8,23%, sedangkan kasus curas menurun sebesar 18,23%,;



**Gambar 16. Tren kasus menonjol tiga tahun terakhir**



**Gambar 17. Barang bukti lahun narkoba tiga tahun terakhir**

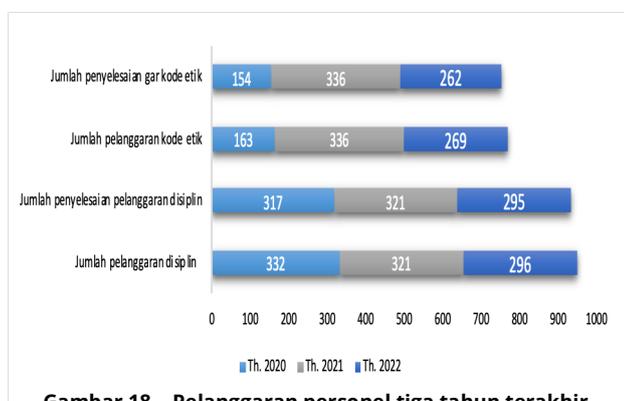
- b) Sementara itu kasus ganja tahun 2022 meningkat besar dibanding tahun 2021, diiringi pula dengan meningkatnya kasus shabu dari tahun 2021, sedangkan untuk kasus obat sintetis menurun. Berlanjut pada barang bukti ekstasi tahun 2022 menurun dibanding 2021 termasuk juga psikotropika.
- c) Sementara itu kasus kekayaan negara, khususnya tindak pidana yang berhubungan dengan UU RI No 11 Tahun 2020

tentang cipta kerja, sejak diundangkan maka pada tahun 2022 terdapat peristiwa menonjol terkait penyalahgunaan pembelian BBM bersubsidi dengan modus tangki yang dimodifikasi sedemikian rupa. Ada pula korban investasi bodong, pelaku *judi online* dan kegiatan pertambangan liar berupa pasir kuarsa di kecamatan Labuhan Maringgall yang melanggar UU RI 03 Tahun 2020 tentang Minerba;

- d) Kemudian dengan berkembangnya teknologi komunikasi, yang tidak diimbangi dengan pengetahuan masyarakat maka berpotensi timbulnya kejahatan ITE. Selanjutnya belum optimalnya dari kegiatan deradikalisasi selama ini, sehingga keberadaan paham radikalisme terus berupaya menyasar dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, melalui kelompok-kelompok yang khilafatul muslimin dan sejenisnya, sehingga menjadi ancaman bagi disintegrasi bangsa;
- e) walaupun beberapa kali kegiatan pre-emetif dan preventif Polda Lampung berhasil menggagalkan pengiriman narkoba jenis shabu, heroin dan ganja, namun tidak menyurutkan para pelaku untuk tetap melakukan upaya distribusi peredaran baik melalui jalur transportasi darat maupun laut karena belum optimal membangun sinergi antar *stakeholder* dalam memutus rantai *suply and demand* narkoba;
- f) kerusuhan massa, konflik antar kampung dan gesekan massa lainnya sebagai akibat buruk dari keberagaman suku bangsa di Lampung, tidak menutup kemungkinan akan mewarnai permasalahan di tahun 2024;
- g) kejahatan yang merupakan penyakit masyarakat yaitu premanisme, perjudian dan pornografi/aksi, termasuk modus baru geng motor masih tetap menjadi kejahatan yang

ada di masyarakat. Demikian juga tindak pidana perdagangan orang, termasuk juga penjualan organ tubuh manusia masih sangat mungkin terjadi mengingat Lampung merupakan gerbang Sumatera yang menghubungkan dengan Jawa. Selain itu juga perairan Lampung yang luas dan jauh dari pengawasan sangat memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut;

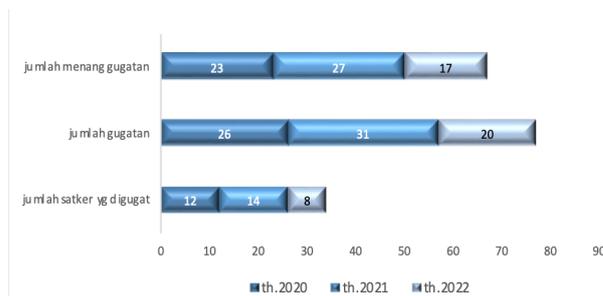
h) penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota Polda Lampung akan berdampak pada pembentukan opini negatif dan membuka peluang terhadap timbulnya sikap antipati dan skeptis



Gambar 18. Pelanggaran personel tiga tahun terakhir.

terhadap tupoksi Kepolisian, yang berujung pada unjuk rasa anarkis pada markas/kantor kepolisian;

- i) Dari data di atas menunjukkan bahwa perbandingan kuantitas pelanggaran disiplin dan Kode Etik Polri dan penyelesaian selama tiga tahun terakhir, terlihat pada tahun 2022 kuantitas pelanggaran disiplin mengalami tren penurunan sebesar 7,79% dan penurunan penyelesaiannya sebesar 8,10%. Sedangkan untuk kuantitas pelanggaran kode etik Polri juga mengalami tren penurunan yaitu sebesar 19,94% dan tren penurunan penyelesaiannya sebesar 22,02%. Dari data ini menunjukkan bahwa kegiatan penegakan disiplin dan pembinaan etika profesi yang dijalankan oleh fungsi propam berdampak pada kualitas disiplin dan etika profesi yang dijalankan personel Polda Lampung.
- j) Demikian juga permasalahan hukum yang dihadapi Polda Lampung dan jajaran, apabila tidak diselesaikan sesuai mekanisme peradilan, akan berdampak pada kredibilitas kepolisian secara umum dalam melakukan kegiatan legalitas



**Gambar 19. Tren permasalahan hukum**

melaksanakan tupoksinya akan mengalami hambatan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Secara data dapat dilihat secara kuantitas jumlah gugatan tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan, sementara itu jumlah gugatan yang dimenangkan selama tiga tahun, hanya tahun 2021 yang

turun satu digit. Kemudian jumlah satker yang digugat juga terus mengalami penurunan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa faktor kekalahan adalah terletak pada kelemahan penyidik yang tidak mengikuti perkembangan aturan yang berkembang dalam penegakan hukum.

## b. Analisis

Pelaksanaan tupoksi Polda Lampung dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari *internal* dan *eksternal*. Sehingga perlu dilakukan identifikasi dan analisa guna menemukan indikasi formula yang tepat dalam menyusun arah kebijakan dan strategi dalam Renja Tahun 2024. Adapun tema dalam Renja tahun 2024 yaitu : **"menjaga stabilitas kamtibmas di daerah hukum Polda Lampung dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan."** Faktor internal berupa

aspek kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor *eksternal* berupa aspek peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Selanjutnya aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan tersebut tertuang dalam analisis metodologi SWOT sebagai berikut:

### 1) Kekuatan

- a) Saat ini postur kekuatan Polda Lampung yang tergelar mulai dari tingkat Provinsi sampai dengan Kecamatan dengan struktur kesatuan kepolisian; satu Polda dengan 25 Satker, 15 Polres/Ta, 138 Polsek dan 31 Polsubsektor, merupakan sumber kekuatan kesatuan Kepolisian yang diberdayakan dalam menjaga dan memelihara kamtibmas di wilayah Provinsi Lampung;
- b) rasio jumlah anggota Polri dengan jumlah penduduk adalah sebesar 1:793, dengan jumlah penduduk 9.000.878 jiwa (Sumber: sensus penduduk, BPS 2020) dan jumlah personel Polri Polda Lampung pada awal tahun 2023 adalah sebanyak 11.343 personel;



Gambar 20. Realisasi penambahan gedung tahun 2022

- c) adanya dukungan sarana dan prasarana Kepolisian yang dimiliki Polda Lampung semakin meningkat dari tahun ke tahun, terutama fasilitas gedung layak pakar dan kendaraan layak pakai yang mendukung operasional tupoksi. Sedangkan peralatan khusus operasional juga kualitas dan kuantitas semakin meningkat, mulai dari;

alat transportasi udara (helikopter), transportasi laut (kapal dengan berbagai tipe) dan transportasi darat (kendaraan bermotor patroli dan kendaraan bermotor taktis), persenjataan, alat penginderaan, teknologi informasi dan komunikasi dan materiil yang tergelar mulai dari Polda sampai dengan tingkat Polsek dan telah dapat mendukung kegiatan operasional Polri, guna kelancaran pelayanan Polri kepada masyarakat;



Gambar 21. Perkembangan penambahan alat angkut, 2022

- d) Dukungan anggaran Polda Lampung setiap tahun mengalami peningkatan dan dapat digunakan baik untuk kegiatan operasional maupun untuk pembinaan, sehingga menambah kepercayaan personil dalam melaksanakan tugas;

DIPA POLDA LAMPUNG	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Pagu awal (Rp.)	1.165.371.110.000,-	1.166.502.186.000,-	1.271.995.008.000,-	1.276.370.236.000,-
Pagu akhir (Rp.)	1.235.379.331.000,-	1.277.172.925.000,-	1.310.263.308.000,-	1.377.147.790.000,-
Realisasi (Rp.)	1.331.208.573.710,-	1.273.342.063.000,-	1.308.313.262.802,-	1.374.566.857.580,-
% realisasi	107,8 %	99,70%	99,85%	99,81%

**Gambar 22. Dukungan anggaran Polda Lampung**

- e) Adanya direktif dan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan tugas Polda Lampung memungkinkan personil Polda Lampung bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang tepat dan efektif;
- f) Implementasi kebijakan organisasi menuju Polri yang presisi dengan 4 kebijakan utama, mulai dari transformasi

Penguatan Kapabilitas Organisasi						
No.	Usur dalam SOTK Polda	Surat	TR/STR	Kep	Peraturan Kapolda	MoU
1.	Unsur Pengawas/ Pembantu Pimp.	3551	1049	1038	1	32
2.	Unsur Pelaks Tupoksi	3074	721	106	Series "thn 2020" Legend Entry	
3.	Unsur Pendukung	1042	34	68	0	8
Penguatan kapasitas organisasi						
No.	Usur dalam SOTK Polda	Sosialisasi	Asistensi	Supervisi	Latnis/ BinteK/Tot	Rapatstaf Rakernis, Go
1.	Unsur Pengawas/ Pembantu Pimp.	381	49	34	29	246
2.	Unsur Pelaks Tupoksi	92	62	144	86	28
3.	Unsur Pendukung	15	4	2	18	18

**Tabel 23. Kegiatan penguatan kapabilitas dan kapasitas organisasi, 2022**

organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan dan transformasi pengawasan, menjadi prioritas dalam pelaksanaan tupoksi;

g) Pada tahun 2022 kinerja Nilai penguatan kapabilitas organisasi yang terdiri lima subkomponen, masing-masing penerbitan direktif baik melalui surat dan surat telegram, penetapan aturan melalui surat keputusan Kapolda dan Peraturan Kapolda serta penyelenggaraan MoU. Sedangkan Nilai penguatan kapasitas organisasi yang terdiri dari lima subkomponen mulai dari penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, asistensi, supervisi, bimbingan teknis/TOT dan rapat-rapat teknis mulai dari kegiatan rapat staf, rapat kerja dan gelar operasional dan pembinaan;

- h) banyaknya kegiatan penguatan kapabilitas dan kapasitas organisasi berdasarkan SOTK Polda Lampung, mulai dari unsur pengawas/pembantu pimpinan terdiri dari 10 satker (Itwasda, Roops, Rorena, Rolog, Ro SDM, Bidpropam, Bidkum, Yanma, Spripim, Bidhumas); unsur pelaksana tugas pokok yang terdiri dari 11 satker (Ditintelkam, Ditbinmas, Ditsamapta, Ditpolairud, Ditlantast, Ditpamobvit, Satbrimob,

Ditreskrim, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba, Dittahti) serta 4 satker unsur pendukung (Biddokkes, Bidkeu, Bid TIK dan SPN), hasil rekapitulasi kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa baik kegiatan penguatan kapabilitas maupun kapasitas organisasi yang dilakukan satker untuk pengawas/pembantu pimpinan adalah yang terbanyak, kemudian disusul unsur pelaksana tugas tugas pokok dan satker pada unsur pendukung.

## **2) Kelemahan**

- a) Dalam penyetaraan dengan sistem pemerintahan daerah, masih terdapat kesatuan Polsek yang membawahi beberapa kecamatan, sehingga memerlukan kekuatan back up yang besar dan rentang kendali yang panjang bagi pengelolaan kegiatan harkamtibmas;
- b) Peningkatan jumlah penduduk yang begitu cepat belum dapat diimbangi dengan penambahan personil Polri, hal ini berdampak pada aktualisasi tupoksi Kepolisian yang memerlukan bantuan besar dari peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam memelihara kamtibmas.
- c) minimnya peningkatan kuantitas baik fasilitas gedung maupun penambahan sarana angkutan dan almatsus lainnya belum dapat didukung sepenuhnya oleh anggaran pemeliharaan, sehingga usia pakai terhadap sarana dan prasarana, dapat menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat;
- d) Pemanfaatan dukungan anggaran yang tidak selektif dan prioritas, menyebabkan menurunnya kinerja yang tepat sasaran sehingga berdampak pada situasi kamtibmas;
- e) Rendahnya pemahaman personil terhadap aturan menyebabkan terjadinya maladministrasi dan pelanggaran disiplin serta kode etik, yang disebabkan kesempatan yang sangat terbatas baik pada fungsi operasional maupun pada fungsi pembinaan untuk mendapatkan pengetahuan kepolisian maupun keterampilan di lapangan, terutama dalam penguasaan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan serta belum terakselerasinya penguasaan teknologi komunikasi berbasis informasi teknologi dengan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga berdampak pada kecepatan pelayanan kepolisian yang tidak sesuai dengan ekspektasi

dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan kesatuan kepolisian di daerah hukum Polda;

- f) kultur budaya organisasi yang baik belum sepenuhnya dipahami dan dihayati, masih terdapat personil yang terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas, meskipun persentase pelanggaran masih rendah apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai negeri pada Polri.

### **3) Peluang**

- a) keberlanjutan program Reformasi Birokrasi dalam rangka upaya percepatan pemberantasan korupsi melalui program pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), demikian juga implementasi Perkap 5 Tahun 2018 tentang perhitungan indeks tata kelola kepolisian, memberikan peluang bagi Polda Lampung untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri yang mencakup aspek struktural, instrumental dan aspek kultural;
- b) sistem desentralisasi/otonomi daerah sebagai pendekatan pelayanan kepada masyarakat yang dijalankan pemerintah saat ini, sejalan dan saling menunjang dengan dekonsentrasi organisasi Polri yang ada pada semua tingkatan Pemerintahan daerah;
- c) adanya kepercayaan masyarakat dan pemerintahan daerah, membuka peluang bagi Polda Lampung dalam mengelola situasi kamtibmas melalui strategi perpolisian masyarakat dan kerjasama dengan stakeholder yang bersinergi dalam rangka menyukseskan pembangunan di wilayah Provinsi Lampung;
- d) keberadaan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang, perlu dimanfaatkan oleh Polda Lampung bersama pemerintahan daerah, guna meringankan pelaksanaan teknis tupoksi Kepolisian sehingga memudahkan keterpaduan dalam mengelola dan memelihara situasi kamtibmas yang kondusif.
- e) Keberadaan aparatur dekonsentrasi (kementerian dan lembaga yang berada di wilayah Provinsi Lampung) memungkinkan diselenggarakannya kerja sama guna menyukseskan pembangunan Nasional di Provinsi Lampung,

terutama kerja sama dalam pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum.

#### **4) Ancaman**

- a) rendahnya pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada institusi pemerintahan menyebabkan rendahnya kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama berakibat pada tingkat kepatuhan, kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap hukum menjadi rendah sehingga menimbulkan permasalahan hukum diantaranya main hakim sendiri unjuk rasa dan perilaku menyimpang;
- b) isu pembagian hasil pembangunan dalam memanfaatkan sumber daya alam antara pusat dan daerah apabila tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan di wilayah Lampung;
- c) ketidakberhasilan dalam pembangunan di wilayah Provinsi Lampung, cenderung berdampak pada meningkatnya empat jenis kejahatan (konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi), baik secara kualitas maupun kuantitas membawa konsekuensi bagi Polda Lampung untuk meningkatkan etos kerjanya;
- d) perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi menimbulkan pengaruh negatif karena rendahnya penguasaan TIK oleh personel Polda Lampung. Hal ini dapat dilihat di samping banyaknya pelaku kejahatan yang menggunakan teknologi dalam mengembangkan modus kejahatannya, juga mudahnya masyarakat mengakses informasi, sehingga distorsi informasi dapat dijadikan untuk mendikreditkan wibawa institusi Polri dan pemerintahan;
- e) belum optimalnya pembaharuan dalam sistem hukum, terobosan hukum dan rendahnya efek jera dari vonis hukuman serta pemberian kesempatan dalam berusaha mengakibatkan permasalahan yang kompleks dari pemanfaatan sumberdaya masyarakat di wilayah provinsi Lampung.

## 2. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan tugas Polda Lampung seiring dengan perkembangan lingkungan strategi global, regional dan nasional serta peristiwa lokal akan semakin berat dan kompleks, ditambah lagi tuntutan dan ekspektasi masyarakat terhadap profesionalisme dan pelayanan kepolisian, yang mengharuskan Polda Lampung untuk menyusun berbagai kegiatan dalam upaya dan aksi yang konkret dan efektif, guna menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan kamtibmas sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis. Secara umum permasalahan yang akan dihadapi Polda Lampung pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Dinamika politik tahun 2024, menjadi tantangan terbesarnya mengingat eskalasi isu politik identitas, misinformasi, terkait hoaks, dan hate speech, ujaran-ujaran kebencian terutama terkait dengan politik identitas, sehingga perlu ketegasan pemerintah dalam regulasi di samping mengendalikan infrastruktur digital tanpa menabrak prinsip-prinsip demokrasi tentang kebebasan berpendapat;
- b. Pemetaan operasional dalam pengelolaan pengamanan dalam setiap tahapan Pemilu 2024 dan pengamanan agenda/event internasional, nasional maupun kedaerahan, perlu dilakukan secara efektif dan efisien guna memperoleh hasil kegiatan yang menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban yang rasional;
- c. hegemoni demokrasi, isu SARA, korupsi, pelanggaran HAM, deforestasi dan kerusakan lingkungan serta sengketa lahan menimbulkan potensi konflik pada masyarakat, ditambah lagi makin masivnya distorsi informasi yang menyebabkan kebutaan informasi yang sebenarnya, sehingga perlu mitigasi dan konsolidasi demokrasi untuk menurunkan tensi dan mereduksi terjadinya segregasi perselisihan di masyarakat;
- d. proses globalisasi yang diiringi dengan tranformasi digital mendorong terjadinya kesenjangan digital masyarakat, informasi semakin asimetris yang berakibat pada perselisihan, konflik yang lambat laun akan mengancam baik aspek ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya dan keamanan. Keadaan ini karena teknologi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber yang menyarang baik secara individu perseorangan maupaun korporasi, sehingga disisi lain menuntut Polri untuk mampu menjaga keamanan siber;
- e. penyebaran paham radikalisme dan intoleransi serta unjuk rasa masih akan mewarnai pada tahun 2024 sehingga menjadi ancaman tersendiri, karena akan tetap menyuarakan ideologi dan menentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara, ditambah lagi simpatisan dan dukungan secara laten terhadap kelompok terorisme berkedok agama masih akan menyasar pada aparat keamanan dan pejabat pemerintah;

- f. peredaran narkoba, dominasi kejahatan konvensional yang terjadi di wilayah Provinsi Lampung pada tahun 2024 masih akan terjadi mengingat pembangunan masih berpusat di perkotaan, sehingga pengelolaan kamtibmas diperlukan kolaborasi bersama seluruh komponen stakeholder, karena permasalahan keamanan ini mencakup dimensi upaya pengelolaan dalam pemeliharaan kamtibmas dan upaya pengungkapan terhadap tindak pidana yang terjadi. Hal ini sebagai upaya untuk meredam dari pada keresahan masyarakat akibat gangguan keamanan;
- g. demikian juga tindak pidana penyelundupan, pencurian terhadap sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup masih akan terjadi, disamping karena menguatnya kepentingan elit politik dalam memperebutkan sumber daya alam mendorong munculnya tuntutan pemekaran wilayah untuk mendapat kekuasaan;
- h. kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak akan tetap menjadi atensi Polda Lampung dan jajaran, mengingat dampak dari korban kejahatan tersebut adalah kurangnya rasa percaya diri, kepada perempuan menghambat kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatannya, dan kepada anak yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan jiwanya pada masa depannya. Demikian juga fenomena dari dekadensi kehidupan kelompok maupun individu yang berperilaku LGBT, peran Polri harus jelas dalam penanganannya, karena hal ini Pemerintah masih belum mengeluarkan Undang-undang yang sah, namun sudah ada beberapa kebijakan yang diambil mulai dari peranan bimbingan kepada masyarakat terhadap bahaya LGBT menyangkut penularan penyakit kelamin akibat perilaku menyimpang. Sedangkan peraturan yang ada saat ini diantaranya UU No.1/1974 tentang perkawinan, dengan tegas menetapkan hanya terdapat dua jenis gender saja, yaitu pria dan wanita dan UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, juga menetapkan dua jenis gender yang sama pada isi kartu tanda penduduk;
- i. semakin bertambah kejahatan berdimensi baru yang membutuhkan pengetahuan dan penanganan yang berbeda, di samping kejadian konflik sosial, aksi kejahatan jalanan dan tindakan premanisme sehingga meresahkan masyarakat;
- j. masih tingginya titik kemacetan, pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas sehingga gangguan Kamtibcarlantas berupa; kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan arus lalu lintas cenderung mengalami peningkatan, sebagai dampak meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan pembangunan sarana dan

prasarana jalan, khususnya di kota-kota besar serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu dan tertib lalu lintas;

- k. masalah keamanan dan ketertiban serta kelancaran berlalu lintas terutama di kota-kota besar masih menyimpan berbagai permasalahan krusial, dikaitkan dengan intensitas kendaraan yang meningkat yang tidak selaras dengan perkembangan sarana jalan dan kebijakan fiskal yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kendaraan;
- l. gangguan kamseltibcar lantas berupa kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan arus lalu lintas cenderung mengalami peningkatan, sebagai dampak meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan pembangunan sarana dan prasarana jalan, khususnya di ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten pada waktu-waktu tertentu ditambah belum efektifnya penggunaan tilang elektronik serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu dan tertib lalu lintas;
- m. kurangnya pengawasan dan tanggung jawab keamanan atau keselamatan penumpang jasa angkutan darat, mendorong meningkatnya angka kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil.
- n. bertambahnya ruas jalan disamping jalur lalu lintas perairan dan udara maka keberadaan pulau-pulau berpenghuni perlu dilakukan pemantauan dari sisi keamanan, guna meminimalisir gangguan keamanan.

## II. Tujuan dan Sasaran

### 1. Visi dan Misi

#### a. Polri

##### 1) Visi

“Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib.”

##### 2) Misi

Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat.

#### b. Polda Lampung

##### 1) Visi

“Terwujudnya daerah hukum Polda Lampung yang aman dan tertib.”

##### 2) Misi

###### a) **Melindungi**, yakni:

Meningkatkan upaya pencegahan dari gangguan kamtibmas, guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat, pemerintah dan segenap sumber daya provinsi Lampung yang terbebas dari gangguan kamtibmas.

###### b) **Mengayomi**, yakni:

Memberikan jaminan terhadap kehidupan masyarakat Lampung dengan meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan daya dukung dan kerja sama untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan kamtibmas;

###### c) **Melayani**, yakni:

membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan kepolisian, baik dalam penegakan hukum maupun layanan dasar publik yang profesional dan berkeadilan.

### 2. Tujuan Jangka Menengah

#### a. Polri

Selaras dengan visi RPJMN 2020-2024 yaitu **“terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong”**. Adapun tema Pembangunan Polri tahun 2024 yaitu: **“menjaga stabilitas kamtibmas dalam rangka**

**mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”** dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI;
- 2) menegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) modernisasi pelayanan Polri;
- 4) mewujudkan Polri yang profesional;
- 5) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.

#### **b. Polda Lampung**

Secara lokalitas Polda Lampung perlu juga memperhatikan RJPMD Provinsi Lampung 2019-2024, terutama dalam memberikan dukungan terhadap misi pemerintah provinsi Lampung yakni pada **misi pertama dari enam misi yang ada, yakni menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai, melalui meningkatkan koordinasi dan dukungan kepada instansi vertikal dan Kab/Kota dalam mendorong terciptanya kamtibmas dan penegakan hukum; dan mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke tingkat pedesaan.** Selanjutnya dalam upaya menyukseskan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Lampung dengan memperhatikan tujuan dari pembangunan jangka menengah Polri, maka tujuan jangka menengah Polda Lampung sebagai berikut:

- 1) Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Menegakan hukum secara berkeadilan.
- 3) Mewujudkan Polda Lampung yang profesional.
- 4) Modernisasi pelayanan Polda Lampung.
- 5) Menerapkan manajemen yang terintegrasi dan terpercaya.

### **3. Sasaran Prioritas.**

#### **a. Polri.**

Mendasari Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yang terdiri dari tujuh prioritas yaitu:

- 1) Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
- 2) pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- 3) SDM berkualitas dan berdaya saing;
- 4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan

- pelayanan dasar;
- 6) lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
  - 7) stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selanjutnya yang menjadi Sasaran Prioritas Polri tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam surat Edaran Nomor: SE/2/II/2023 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat dengan memperkuat stabilitas harkamtibmas di lokasi rawan kejahatan;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik polri yang inovatif;
- 3) Meningkatkan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang transparan dan akuntabel;
- 4) Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri;
- 5) Pemenuhan sarana prasarana dan almatsus Polri yang modern;
- 6) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui optimalisasi pengawasan yang efektif berbasis teknologi dan informasi.

#### **b. Polda Lampung**

Sebagai harmonisasi dalam Renja Polda Lampung T.A. 2024, agenda prioritas daerah dalam RKPDP Provinsi Lampung Tahun 2024 selaras dengan RKP 2024 yaitu **"Percepatan tranformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan."** Dari tema yang ada, Provinsi Lampung memiliki 6 prioritas pembangunan pada tahun 2024, yang pertama transformasi ekonomi dengan meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan. meningkatkan kualitas SDM, peningkatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, menjamin kehidupan masyarakat yang religius, aman, dan berbudaya, dan yang terakhir kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Berdasarkan sasaran prioritas Polri yang diselaraskan dengan agenda prioritas daerah pada RJPMD Provinsi Lampung 2020-2024, maka Sasaran Prioritas Polda Lampung dalam Renja tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat dengan memperkuat stabilitas harkamtibmas di lokasi rawan kejahatan;
- 2) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri yang inovatif;

- 3) meningkatkan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang transparan dan akuntabel;
- 4) meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri;
- 5) pemenuhan sarana prasarana dan almatsus Polri yang modern;
- 6) mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui optimalisasi pengawasan yang efektif berbasis teknologi dan informasi.

### III. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2024.

#### 1. Polri

Program Prioritas nasional tahun 2024 dalam rangka stabilitas keamanan nasional adalah sebagai berikut:

- a. konsolidasi demokrasi;
- b. optimalisasi kebijakan luar negeri;
- c. penegakkan hukum nasional;
- d. reformasi kelembagaan birokrasi;
- e. menjaga stabilitas keamanan nasional.

Dari program prioritas nasional tersebut di atas, menjaga stabilitas keamanan nasional menjadi prioritas utama Polri, sedangkan untuk prioritas nasional lainnya, Polri merupakan pendukung atau *supporting* dari Kementerian/Lembaga terkait. Selanjutnya untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polri Tahun 2024, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat dengan memperkuat stabilitas harkamtibmas di lokasi rawan kejahatan”**, yaitu:
  - 1) meningkatkan kemampuan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - 2) menurunkan potensi kejahatan, gangguan kamtibmas melalui kegiatan pencegahan yang proaktif guna mencegah terjadinya kejahatan;
  - 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan **“pemolisian prediktif”** dalam rangka menjaga stabilitas harkamtibmas” (*cooling system*);
  - 4) mengedepankan penanganan konflik secara humanis;
  - 5) meningkatkan gakkum lintas menggunakan ETLE dan tilang manual serta mengoptimalkan kamseltibcar lintas guna memberikan rasa aman di tengah masyarakat baik saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan;
  - 6) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di lokasi rawan gempa dan bencana;
  - 7) melaksanakan kegiatan pengamanan event nasional/ internasional tahun 2024;
  - 8) meningkatkan penggelaran operasional kepolisian dan *back up* kewilayahan dalam rangka penanganan konflik sosial; pengamanan unjuk rasa; dan menjalin sinergisitas polisional serta gangguan keamanan bersenjata;

- 9) meningkatkan kerja sama kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung stabilitas harkamtibmas;
  - 10) meningkatkan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di wilayah perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;
  - 11) melaksanakan pengamanan tahapan Pemilu 2024;
  - 12) meningkatkan kehadiran Polridi wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni;
  - 13) melaksanakan penelitian dan survey Indeks Kamtibmas.
- b. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"meningkatkan kualitas pelayanan publik polri yang inovatif"**, yaitu:
- 1) modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi;
  - 2) meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat (alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan) guna meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik;
  - 3) meningkatkan pembangunan ruang SPKT dan RPK yang online dan humanis serta berbasis TIK;
  - 4) meningkatkan *quick response* kepolisian sesuai standar operasional prosedur (SOP).
- c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"meningkatkan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang transparan dan akuntabel"**, yaitu:
- 1) meningkatkan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
  - 2) melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kemampuan penyidik di era 4.0;
  - 3) meningkatkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
  - 4) mengoptimalkan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional.
- d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"meningkatkan profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri"**, yaitu:
- 1) meningkatkan kualitas 8 standar pendidikan era police 4.0;
  - 2) mengoptimalkan penggunaan Bisnis Proses Polri dalam pengembangan struktur organisasi Polri;
  - 3) meningkatkan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0;
  - 4) meningkatkan kerjasama pendidikan di dalam dan luar negeri;

- 5) meningkatkan pengelolaan SDM yang humanis;
  - 6) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;
  - 7) meningkatkan keterampilan dan etika yanlik serta kemampuan komunikasi digital;
  - 8) meningkatkan kesejahteraan melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja bagi aparaturn Polri;
- e. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"pemenuhan sarana prasarana dan almatsus Polri yang modern"**, yaitu:
- 1) memenuhi sarana dan prasarana dan Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan kepada masyarakat;
  - 2) meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (Bumnis) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Alpalhankam Polri;
  - 3) memenuhi rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di wilayah perbatasan;
  - 4) pengembangan Labfor di kewilayahan secara bertahap;
  - 5) meningkatkan pengembangan Almatsus SCI;
  - 6) membangun dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;
  - 7) mengoptimalkan *hotline 110* dalam menerima dan merespon pengaduan/ pelaporan masyarakat.
- f. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui optimalisasi pengawasan yang efektif berbasis teknologi informasi"**, yaitu:
- 1) menguatkan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online*;
  - 2) mengoptimalkan Saber pungli di lingkungan internal;
  - 3) meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri;
  - 4) meningkatkan tatakelola manajemen perencanaan dan penganggaran Polri yang akuntabel;
  - 5) menata kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar efektif dan efisien sesuai dengan Bisnis Proses Polri;
  - 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri.

## 2. Polda Lampung

Dari tema Rencana Kerja Polri Tahun 2024 **“Polri yang presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta suksesnya pengamanan Pemilu 2024”** maka hal utama dalam Rencana Kerja Polda Lampung T.A. 2024 adalah menjabarkan sasaran prioritas dan arah kebijakan Polri tahun 2024 dengan menyusun strategi yang selaras, harmonis dengan sumber daya, alokasi program anggaran, kegiatan dan indikator kinerja berikut sejalan dengan transformasi menuju Polri yang Presisi dan juga disesuaikan guna menghadapi tantangan tugas dan kondisi lingkungan strategis di wilayah hukum Polda Lampung sebagai berikut:

a. sasaran prioritas pertama **mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat dengan memperkuat stabilitas harkamtibmas di lokasi rawan kejahatan**”, dengan arah kebijakannya sebagai berikut:

**1) meningkatkan kemampuan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat**; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, disusun strategi sebagai berikut:

- (1) meningkatkan kemampuan dalam merumuskan deteksi aksi guna menurunkan dan mengeliminir setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial.  
(giat3112/progHarkamtibmas/SP1/SS5/IKP7);
- (2) meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) fungsi intelkam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan negara dan keamanan khusus;  
(giat3114/progHarkamtibmas/SP1/SS5/IKP7);  
(giat3115/progHarkamtibmas/SP1/SS5/IKP7);  
(giat3116/progHarkamtibmas/SP1/SS5/IKP7);  
(giat3117/progHarkamtibmas/SP1/SS5/IKP7);  
(giat3150/progHarkamtibmas/SP1/SS5/IKP7);
- (3) meningkatkan penguatan Bhabinkamtibmas secara efektif dalam mendukung harkamtibmas;  
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS3/IKP3);
- (4) meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas dalam menjalankan program perpolisian masyarakat;  
(giat3128/progHarkamtibmas/SP1/SS5/IKU7);
- (5) melakukan anev secara berkala terhadap komponen penyusun indeks harkamtibmas.  
(giat5054/progdukma/SP1/SS5/IKU7);

**2) menurunkan potensi kejahatan, gangguan kamtibmas melalui kegiatan pencegahan yang proaktif;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, disusun strategi sebagai berikut:

- (6) meningkatkan kegiatan Bhabinkamtibmas dalam membina pokdar kamtibmas dan aktif dalam membantu pemerintah setempat dalam program pengentasan kemiskinan ekstrim;  
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- (7) Meningkatkan pemberian pembinaan, penyuluhan, konsultasi dan pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat melalui kegiatan sambang Bhabinkamtibmas;  
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- (8) meningkatkan kegiatan penggalangan bidang politik guna mengeliminir gelombang unjuk rasa akibat polarisasi politik identitas;  
(giat3114/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IK1);
- (9) meningkatkan kegiatan penyelidikan bidang ekonomi terhadap program pengentasan kemiskinan ekstrim;  
(giat3115/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IK1)
- (10) membuat konten kreatif tematik dalam rangka mengedukasi dan menghimbau tentang kewaspadaan terhadap distorsi informasi dan kejahatan siber;  
(giat3149/progDukma/SP1/SS4/IKP6)
- (11) meningkatkan peran serta dari tokoh masyarakat dalam mencegah polarisasi/perpecahan masyarakat pada masa pemilu melalui aktualisasi perpolisian masyarakat;  
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- (12) meningkatkan pemetaan dinamis terhadap titik hotspot / rawan gangguan kamtibmas.  
(giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- (13) penguatan kegiatan patroli pada titik hotspot/rawan gangguan kamtibmas;  
(giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- (14) meningkatkan pemetaan objek vital nasional dan objek vital lainnya;  
(giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- (15) meningkatkan pelayanan pengamanan pada obyek vital nasional dan obyek vital lainnya (termasuk obyek wisata)

(giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);

- (16) menyiagakan K9 dalam rangka antisipasi gangguan kriminalitas dan bantuan pelacakan;  
(giat5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1).

**3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan "pemolisian prediktif" dalam rangka menjaga stabilitas harkamtibmas" (cooling system);**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, disusun strategi sebagai berikut:

- (17) Melanjutkan kegiatan pembinaan petugas linmas dan pamswakarsa dalam rangka menjaga stabilitas harkamtibmas;

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);

- (18) mengimplementasikan program "Polisi RW" guna menguatkan pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam menjaga stabilitas harkamtibmas;

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);

- (19) meningkatkan peran serta tokoh masyarakat dalam mencegah polarisasi/perpecahan masyarakat pada masa pemilu melalui aktualisasi perpolisian masyarakat;

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1)

- (20) aktif mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim, melalui kegiatan polmas

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1)

- (21) Menguat pembinaan peran KBPP untuk andil dalam rangka menjaga stabilitas harkamtibmas;

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/);

- (22) Melanjutkan kegiatan dikmas lintas dalam menguatkan budaya tertib berlalu lintas guna terwujudnya kamseltibcar lintas;

(giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1).

**4) mengedepankan penanganan konflik secara humanis;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (23) Mengoptimalkan kegiatan penggalangan dalam penanganan konflik di masyarakat.

(giat3114/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat16, renaksi 60,64,65);

- (24) Menguatkan peran Bhabinkamtibmas dalam pengelolaan informasi dini dalam penanganan konflik di masyarakat; (giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- (25) menetralsir ketegangan terhadap potensi konflik sosial/politik yang terjadi di masyarakat dengan mengalihkan pada aktivitas positif melalui program Polmas; (giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/);
- (26) penggelaran *back up* Satbrimob pada daerah konflik untuk melakukan pengamanan secara humanis baik sebelum, saat dan pasca konflik; (giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1).

**5) meningkatkan Kamseltibcar dalam berlalu lintas guna memberikan rasa aman di tengah masyarakat saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan;;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (27) meningkatkan kegiatan turjawali samapta pada daerah rawan gangguan kamtibmas, termasuk pada lokasi pusat perdagangan/bisnis, dalam rangka mendukung kondusivitas pertumbuhan ekonomi setempat; (giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- (28) mengoptimalkan pemetaan dinamis terhadap titik *blackspot/* rawan gangguan kamtibmas. (giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- (29) mengoptimalkan kegiatan patroli dan penjagaan pada titik *blackspot/*rawan gangguan kamseltibcarlantas; (giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1).

**6) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di lokasi rawan gempa, bencana dan daerah kumuh serta pada lokasi masyarakat miskin;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (30) meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam memetakan wilayah rawan gempa dan bencana, termasuk optimalisasi kerja sama penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan *trauma healing* pada warga di daerah gempa dan bencana sebagai efektivitas pelaksanaan operasi kontijensi; (giat3128/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);

- (31) meningkatkan respon partisipasi Polri kepada pemerintah setempat dalam menata daerah kumuh dengan mengsiagakan perbantuan personel samapta; (giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- (32) membantu meringankan beban pada lokasi masyarakat miskin, melalui bhakti kesehatan Polri; (giat3072/progDukma/SP1/SS1/IKU1);
- (33) mengoptimalkan petugas bhabinkamtibmas dalam membantu identifikasi dan evakuasi warga di daerah bencana; (giat5076/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- (34) mengoptimalkan personel Satbrimob dalam membantu dan melayani evakuasi dan SAR terbatas pada warga di daerah bencana; (giat5087/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1).

**7) melaksanakan kegiatan pengamanan event nasional/ internasional tahun 2024;** untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (35) optimalisasi dalam menyelenggarakan operasi Kepolisian terkait pengamanan event nasional/internasional tahun 2024; (giat5079/progharkamtibmas/SP1/SS1/IK1) (giat5087/progharkamtibmas/SP1/SS1/IK1);
- (36) melaksanakan operasi pengamanan kegiatan masyarakat pada even internasional *wold surving league* di Kab Pesisir Barat; (giat5080/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- (37) Melaksanakan operasi pengamanan setiap kunjungan kerja pejabat negara tahun 2024; (giat5080/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1); (giat3133/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1); (giat3116/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- (38) menyelenggarakan pengamanan pada objek proyek pembangunan nasional; (giat3131/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1).

**8) meningkatkan penggelaran operasional kepolisian dan *back up* kewilayahan dalam rangka penanganan konflik sosial; pengamanan unjuk rasa dan menjalin sinergisitas polisional serta gangguan keamanan bersenjata;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (39) mengoptimal koordinasi kesiapan personel back up Satwil dalam penanganan konflik sosial dan pengamanan unjuk rasa;  
(giat5076/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);  
(giat3130/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);  
(giat5087/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- (40) mengoptimalkan pengelolaan pengamanan kegiatan masyarakat;  
giat3130/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- (41) menyelenggarakan *back up* Satbrimob terhadap Satwil dalam menghadapi konflik sosial;  
(giat5087/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- (42) meningkatkan kegiatan Polmas dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif;  
(giat5076/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- (43) tergelarnya pelayanan pengamanan di kawasan obvitnas dan obvit tertentu.  
(giat3131/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- (44) menyelenggarakan operasi kontijensi akibat eskalasi unjuk rasa/konflik sosial yang meningkat/anarkhis;  
(giat5079/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1)

**9) mengoptimalkan kerja sama lintas sektoral guna mendukung stabilitas harkamtibmas;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (45) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan MoU/kerja sama dalam rangka harkamtibmas yang telah ada;  
(giat3120/ progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);  
(giat3155/progdukma/SP1/SS5/IKP7);  
(giat3068/progdukma/SP1/SS5/IKP7);  
(giat3091/progdukma/SP1/SS5/IKP7);
- (46) menyelenggarakan MoU/kerja sama dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas.  
(giat3120/progharkamtibmas/SP1/SS5/IKP7);  
(giat3155/progdukma/SP1/SS5/IKP7);  
(giat3068/progdukma/SP1/SS5/IKP7);

**10) meningkatkan penggelaran patroli kapal dan BKO pesawat udara Polri pada pulau tidak berpenghuni/terluar, guna mendukung terlaksananya pengamanan laut.**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut maka **strategi** yang akan dilakukan:

(47) melakukan pemetaan lokasi patroli perairan baik sepanjang garis pantasi maupun pulau berpenghuni /tidak berpenghuni dalam rangka pengamanan daerah hukum Polda Lampung;

(giat3134/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);

(48) melakukan pemetaan lokasi patroli perairan baik sepanjang garis pantasi maupun pulau berpenghuni /tidak berpenghuni dalam rangka pengamanan daerah hukum Polda Lampung;

(giat3134/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);

(49) meningkatkan kegiatan pembinaan kamtibmas pada masyarakat sepanjang garis pantai;

(giat3134/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);

**11) melaksanakan pengamanan tahapan Pemilu 2024.**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut maka **strategi** yang dilakukan:

(50) menyelenggarakan operasi pengamanan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024;

(giat5080/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);

(51) melaksanakan kegiatan tujawali dalam rangka memelihara kondusivitas pelaksanaan Pemilu dan pilukada 2024;

(giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);

(52) pelayanan pengamanan objek vital nasional/objek vital lainnya dalam rangka memelihara kondusivitas pelaksanaan Pemilu dan pilukada 2024;

(giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);

(giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);

(53) mensiagakan Satbrimob untuk mengantisipasi meningkatnya kejahatan yang berskala ke intensitas tinggi pada setiap tahapan pemilu dan pilkada 2024;

(giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);

(54) mengoptimalkan kegiatan pembinaan jaringan di bidang politik;

(giat3114/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);

(55) mengefektifkan pelaksanaan tim Gakkumdu guna menangani tindak pidana pelanggaran pemilu dan pemilukada 2024;

(giat5079/progLidikSidik/SP1/SS2/IKU2);

**12) meningkatkan kehadiran dan penguatan organisasi Polri pada wilayah rawan dan belum terjangkau satuan kepolisian.**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut maka strategi yang dilakukan:

(56) melakukan pemetaan terhadap daerah hukum kepolisian yang belum terdapat satuan kepolisian;  
(giat5054/progdukma/SP1/SS4/IKP7);

(57) melaksanakan kajian organisasi secara prioritas terhadap usulan pembentukan Polsubsektor dan Polsek;  
(giat5054/progdukma/SP1/SS4/IKP7);

(58) meningkatkan kegiatan patroli jarak jauh dalam rangka kehadiran Polri pada wilayah rawan dan jauh dari jangkauan satuan kepolisian setempat;  
(giat3130,3131,3135/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1)

(59) menempatkan satuan Brimob pada daerah rawan berintensitas tinggi;  
(giat5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1).

b. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"meningkatkan kualitas pelayanan publik polri yang inovatif"**, yaitu:

**13) mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:

(60) meningkatkan pelayanan SIM *online* dan keliling yang dapat menjangkau lapisan masyarakat.  
(giat3133/progharkamtibmas/SP2/SS4/IKP4)

(61) meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana sentra pelayanan publik pada fungsi Samapta, Pamobvit, Polairud dan Intelkam;  
(giat5059/progmodernisasi/SP2/SS4/IKP4);

(62) pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik pada fungsi Reskrim, khususnya pelayanan identifikasi sebagai baseline data forensik kepolisian;

(giat3137/proglidiksidik/SP2/SS2);

(63) meningkatkan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana bidang TIK, khususnya sarana *command center* dan sarana *vicon*;

(giat3071/progdukma/SP2/SS4/IKP4);

(64) mendorong dan merangsang adanya inisiatif inovasi dalam pelayanan publik yang terintegrasi dengan memperhatikan standar pelayanan minimal;

(giat5053/progdukma/SP2/SS5/IKP8).

**14) meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat (alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan) guna meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik Polri meningkatkan kualitas pelayanan dengan memiliki parameter ukuran untuk perbaikan, menjaga *zero tolerance* terhadap penyimpangan.**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:

(65) meningkatkan integritas peserta latihan fungsi melalui internalisasi nilai tribrata dan catur prasetya.

(giat3100/progProfesionalisme/SP2/SS3/IKU3);

(66) menyelenggarakan kegiatan penilaian kepuasan layanan kepolisian, termasuk penilaian kepuasan terhadap layanan rumkit Bayangkara Polda Lampung;

(giat5054/progDukma/SP2/SS5/IKP9);

(67) meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi *binmas online system* (bos) V2 .

(giat5076/progHarkamtibmas/SP2/SS2/IKU2);

(68) optimalisasi operasional pelayanan fungsi regident lintas;

(giat3133/progHarkamtibmas/SP2/SS5/IKU9);

(69) optimalisasi operasional pelayanan Satpas SKCK.

(giat3128/progHarkamtibmas/SP2/SS5/IKU9/PPK prog11, giat40, renaksi 141,144).

**15) Mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan memanfaatkan informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, termasuk membangun dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi.**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:

- (70) meningkatkan pemanfaatan instalasi jaringan internet;  
(giat3071/progDukma/SP5/SS4/IKU5);
- (71) pembinaan SPBE.  
(giat5052/progDukma/SP5/SS4/IKU5);
- (72) mengoptimalkan operasional penggunaan *call center* 110  
(giat5080/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1).

**16) meningkatkan pemahaman terhadap alur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam organisasi baik pada satker Polda maupun Polres, termasuk meningkatkan *quick response* kepolisian sesuai standar operasional prosedur (SOP);**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:

- (73) meningkatkan pemahaman dalam penyusun peta proses bisnis organisasi;  
(giat5052/progDukma/SP2/SS5/IKP7);
- (74) meningkatkan kegiatan asistensi/supervisi terhadap unit pelayanan publik dalam rangka terselenggaranya pelayanan terpadu dan tata kelola kepolisian yang efektif;  
(giat5053/progDukma/SP2/SS5/IKP7);
- (75) meningkatkan tata kelola dalam pelayanan jasa pengamanan dan sistem pengamanan obvitnas dan obvit tertentu melalui pembinaan teknis pembina fungsi obvit supervisi/sistensi dan verifikasi serta audit pengamanan;  
(giat3131/progHarkamtibmas/SP2/SS2/IKU2).
- (76) Melanjutkan monev terhadap SOP pelayanan Kepolisian yang ada.  
(giat3155/progDukma/SP2/SS5/IKU7);
- (77) meningkatkan kemampuan *quick response* fungsi Samapta melalui kegiatan pembinaan (rakernis, supervisi dan asistensi.  
(giat3130/ progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1);
- (78) mengoptimalkan bantuan teknis khusus Satwa dalam pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban;  
(giat5081/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1/);
- (79) meningkatkan keterampilan dan etika pelayanan publik serta kemampuan komunikasi digital  
(giat3070/progDukma/SP2/SS5/IKP7);

- (80) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi melalui pembinaan fungsi lintas (rakernis, supervisi, dan asistensi);  
(giat3128/progHarkamtibmas/SP2/SS5/IKP7)
- c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“meningkatkan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang transparan dan akuntabel”**, yaitu:
- 17) meningkatkan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;**  
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (81) mengoptimalkan kemampuan kapasitas dan kapabilitas organisasi melalui pembinaan (rakernis, supervisi, dan asistensi) fungsi reskrim (kriminal, krimsus dan narkoba);  
(giat3137/progLidiksidik/SP3/SS5/IKP7);
- (82) mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kerja penyidik pada aplikasi e-MP dan kinerja penyidik pegawai negeri sipil pada aplikasi e-PPNS.  
(giat5085/progLidikSidik/SP3/SS5/IKU7);
- (83) mengakselerasi terhadap pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana yang menonjol terutama kasus C<sub>3</sub> (curat, curat dan curanmor) dan meningkatkan pengungkapan terhadap TPPO;  
(giat3142/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2);
- (84) meningkatkan pemberantasan dan penanggulangan akibat tindak pidana narkoba dan sejenisnya.  
(giat3144/prog5/SP3/SS2/IKU2);
- (85) meningkatkan pengungkapan tindak pidana ekonomi, terutama penyelesaian tindak pidana di bidang pangan, pertanahan, energi, investasi/ perbankan (sektor keuangan);  
(giat3145/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2);
- (86) meningkatkan pengungkapan tindak pidana korupsi;  
(giat3146/progLidikSidik/SP3/SS3/IKU3);
- (87) meningkatkan pengungkapan tindak pidana siber, terutama mengedepankan kualitas dan edukasi masyarakat;  
(giat3151/progLidikSidik/SP3/SS3/IKU3);
- (88) meningkatkan pengungkapan tindak pidana tertentu;

(giat5083/progLidikSidik/SP3/SS3/IKU3);

(89) meningkatkan pengungkapan tindak pidana perairan dalam mendukung kegiatan keamanan laut;

(giat4342/progLidikSidik/SP3/SS3/IKU3);

(90) meningkatkan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, dalam rangka mewujudkan "Road Safety" serta Penegakkan Hukum melalui "ETLE" dan Tilang Manual.

(giat4343/progLidikSidik/SP3/SS3/IKU3);

(91) mengoptimalkan dalam penyelarasan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan;

(giat3142/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2)

(92) mengantisipasi terhadap proses penyelesaian tindak pidana yang berdampak hukum dengan pemberian bantuan hukum/advokasi dan sosialisasi hukum;

(giat3154/progDukma/SP3/SS5/IKP12);

(giat3155/progDukma/SP3/SS5/IKP7);

(93) mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum dan menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta transaksional;

(giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2);

(94) meningkatkan koordinasi dalam penanganan tindak pidana pemilu dengan Bawaslu, Kejaksaan dalam Sentra Gakumdu;

(giat3142/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2);

**18) melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kemampuan penyidik di era 4.0;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(95) optimalisasi *mapping* terhadap pemutahiran data penyidik.

(giat3137/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2);

(96) memprioritaskan penyidik untuk diusulkan mendapat sertifikasi dari Lemdiklat Polri.

(giat3107/progProfesionalisme/SP3/SS3/IKU3/renaksi PPK 96).

**19) meningkatkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:

(97) mengoptimalkan pelayanan terhadap perkembangan hasil penyidikan melalui aplikasi SP<sub>2</sub>HP *online*.  
(giat3137/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2);

(98) mengoptimalkan peran Wasidik dalam proses penyidikan.  
(giat5086/progLidikSidik/SP3/SS5/IKP7);

(99) mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terhadap entry data penyidikan dalam aplikasi E-MP.  
(giat3137/progLidikSidik/SP3/SS5/IKP7);

**20) mendukung terhadap optimalkan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional, guna kehandalan dan validitas data tindak pidana dan penyelesaiannya;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:

(100) melakukan diseminasi data laporan polisi dan pada aplikasi e-MP dan aplikasi DORS untuk mengetahui situasi pengaduan yang efektif.  
(giat3137/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2);

(101) melanjutkan pendataan komponen penyusun indeks penegakan hukum melalui diseminasi capaian kinerja penyidikan tindak pidana;  
(giat5051/progDukma/SP3/SS5/IKP7).

d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"meningkatkan profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri"**, yaitu:

**21) meningkatkan kualitas 8 standar pendidikan era police 4.0;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(102) optimalisasi seleksi gadik/tenaga instruktur SPN Kemiling untuk mendapatkan sertifikasi.  
(giat3100/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKU3/);

(103) melanjutkan pengusukan sertifikasi bagi lulusan diklat, gadik/tenaga instruktur dan pengasuh SPN Polda Lampung.  
(giat3100/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKU3);

- (104)menyelenggarakan pelatihan dan harkatpuan fungsi Dalmas dan negosiator dalam menghadapi tahapan pengamanan pemilu 2024.  
(giat3100/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKU3);
- (105)meningkatkan pelatihan dalam penanganan konflik secara humanis bagi personel Brimob, Samapta dan Binmas dalam rangka menghadapi pemilu 2024;  
(giat3100/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKU3);  
(giat5076/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKU3);  
(giat3130/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKU3);  
(giat5087/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKU3).
- (106)Menyelenggarakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemeringah;  
(giat5059/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKU3);
- (107)Meningkatkan pembinaan terhadap fungsi Dokkes jajaran Polda Lampung melalui Rapat kerja teknis, supervisi, dan asisitensi Siedokkes Polres;  
(giat3072/progDukma/SP5/SS5/IKP7);
- (108)Meningkatkan kemampuan kapabilitas APIP dalam kegiatan verifikasi administrasi kepolisiandalam mencegah terjadinya maladministrasi dan tindakan korupsi;  
(giat3191/progDukma/SP5/SS5/IKP7);
- (109)meningkatkan kemampuan operator aplikasi Sirena satker;  
(giat5054/progDukma/SP4/SS5/IKU7)
- (110)mengusulkan sertifikasi profesi terhadap penyidik fungsi polairud dan lintas.  
(giat3107/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKU3).

**22) mengoptimalkan penggunaan peta Bisnis Proses Polri dalam pengembangan struktur organisasi Polri;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (111)mengoptimalkan monev pengisian ABK satker sebagai bahan kebijakan dalam pengisian DSP.  
(giat5052/progDukma/SP4/SS5/IKU7);
- (112)melakukan monitoring dan evaluasi terhadap data SIK<sub>3</sub> pada satuan tingkat Polda, Polres dan Polsek serta usulan

perubahan dan peningkatan satuan Kepolisian serta usulan peningkatan tipe Polres;  
(giat5052/progDukma/SP4/SS5/IKU7);

(113)melakukan monitoring terhadap implementasi pengembangan struktur organisasi Polres Pesisir Barat dan Polsek serta Polsubsektor baru;  
(giat5052/progDukma/SP4/SS5/IKU7).

**23) meningkatkan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(114)melanjutkan rekrutmen anggota Polri secara proaktif dan terpadu dengan pendekatan teknologi informasi (*affirmative action, talent scouting dan reward*).  
giat3107/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKP3);

(115)menyelenggarakan kegiatan seleksi Dikbagum dengan mengoptimalkan penilaian 13 komponen secara obyektif.  
(giat3107/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKU3);

(116)melaksanakan analisa dan evaluasi organisasi terkait implemementasi organisasi baru dan pengelolaan personel Polda dan jajaran;  
(giat5052/progDuma/SP4/SS5/IKP7);

(117)memonitoring terhadap personel yang berprestasi dan menyiapkan untuk mendapatkan penghargaan;  
(giat3096/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKU3).

(118)melanjutkan peningkatan pemahaman personel terhadap perkembangan peraturan kepolisian melalui sosialisasi guna memperkaya wawasan dalam pelaksanaan tupoksi;  
(giat3155/progDuma/SP4/SS5/IKP7);

**24) mengoptimalkan kerjasama dalam meningkatkan kualitas pendidikan kepolisian;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(119)melakukan monev terhadap MoU yang berhubungan dalam rekrutmen dan pendidikan.  
(giat3120/prog4/SP4/SS3/IKU3);

(120)melakukan sosialisasi hasil kerja sama denga perguruan tinggi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi personel Polda Lampung.

(giat3107/progProfesionalisme/SP4/SS3).

**25) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(121) melanjutkan pemutahiran SIPP dan SMK *Online*.  
(giat3108/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKU3);

(122) melanjutkan penyelenggaraan kegiatan *assesment center* lelang jabatan.  
(giat3108/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKU3);

(123) melanjutkan menyelenggarakan pembinaan karier personel berdasarkan prioritas kebutuhan organisasi dengan memperhatikan pengarusutamaan gender.  
(giat3108/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKU3).

**26) meningkatkan kesejahteraan melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(124) melanjutkan pemutahiran pemutahiran keanggotaan BPJS bagi PNPP dan keluarga.  
(giat3072/progDukma/SP4/SS5/IKU7);

(125) melanjutkan penyelenggaraan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi personel yang akan melaksanakan purna tugas.  
(giat3105/progProfesionalisme/SP4/SS5/IKU7);

(126) melanjutkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi PNPP.  
(giat3072/progDukma/SP4/SS5/IKU7);

(127) melakukan pelayanan administrasi pegawai termasuk pelayanan hak personel dan pemeriksaan psikologi terhadap personel yang mengalami gangguan kejiwaan;  
(giat3110/progProfesionalisme/SP4/SS5/IKU7);

(128) meningkatkan pemeliharaan sarpras alat kesehatan;  
(giat5062/progModernisasi/SP4/SS5/IKU7);

(129) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang Prima;  
(giat3072/progDukma/SP4/SS5/IKP7);

(130) meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan sistem perencanaan anggaran;  
(giat3073/progDukma/SP4/SS5/IKP7);

e. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **pemenuhan sarana prasarana dan Almatsus Polri yang modern**", yaitu:

**27) memenuhi sarana dan prasarana dan Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan kepada masyarakat;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(131) melanjutkan pemeliharaan dan perawatan gedung perkantoran dan fasilitas lainnya;  
(giat5062/progModernisasi/SP5/SS4/IKU4);

(132) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan pembangunan gedung perkantoran dan rumdin;  
(giat5062/progModernisasi/SP5/SS4/IKU4);

(133) melakukan kajian terhadap kebutuhan pembangunan gedung perkantoran dan rumdin;  
(giat5051/progDukma/SP5/SS4/IKU4);

(134) melakukan pemeliharaan gedung dan peralatan pada lima titik command center.  
(giat3071/progDukma/SP5/SS4/IKU4);

**28) meningkatkan peran peran pembinaan fungsi sarpras dalam proses pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan SIMAK BMN;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(135) memberikan bantuan teknis dalam pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor di Polda Lampung;  
(giat5062/progModernisasi/SP5/SS5/IKU7);

(136) melanjutkan pengelolaan info sarpras;  
(giat5059/progModernisasi/SP5/SS4/IKU4)

**29) pemenuhan rumah dinas pegawai Polri dan pembangunan fasilitas perkantoran dan faskes;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(137) pembangunan sarana gedung perkantoran dan rumdin;  
(giat5062/progModernisasi/SP5/SS4/IKU4);

(138) melanjutkan pembangunan gedung rawat inap rumkit Bayangkara;  
(giat5062/progModernisasi/SP5/SS4/IKU4);

- f. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui optimalisasi pengawasan yang efektif berbasis teknologi informasi”**, yaitu:

**30) menguatkan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(139)mengoptimalkan pelayanan pengaduan masyarakat terkait kinerja anggota Polisi melalui aplikasi propam presisi.

(giat3089/progDukma/SP6/SS5/IKU10);

(140)mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat melalui penggunaan aplikasi dumas presisi.

(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKU11);

(141)mengoptimalkan kegiatan klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu.

(giat3089/progDukma/SP6/SS5/IKU10);

(142)mengakselerasi pengaduan masyarakat yang bersumber dari pengawas eksternal;

(giat3089/progDukma/SP6/SS5/IKU10).

(143)Meningkatkan kepastian hukum terhadap penyelesaian pelanggaran personel Polri;

(giat3088/progDukma/SP6/SS5/IKU10)

(giat3090/progDukma/SP6/SS5/IKU10);

(144)Memberikan bantuan hukum untuk memenuhi kepastian hukum dalam penyelesaian pelanggaran personel yang berkeadilan;

(giat3154/progDukma/SP6/SS5/IKU11);

**31) mengoptimalkan Saber pungli di lingkungan internal;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(145)meningkatkan implementasi Perpol Nomor 2 Tahun 2022 tentang Waskat melalui pemberdayaan fungsi Propam guna memaksimalkan upaya pencegahan dan mitigasi pelanggaran anggota Polri;

(giat3090/progDukma/SP6/SS5/IK10);

(146)melanjutkan sinergi kerjasama antar Pokja satgas Saber pungli dalam pengungkapan kasus pungli;

(giat3089/progDukma/SP6/SS5/IKP10);

(147)mengoptimalkan kegiatan pengamanan personel dan bahan keterangan dan kegiatan internal kepolisian;  
(giat3089/progDukma/SP6/SS5/IKP11);

(148)meningkatkan kegiatan saber pungli yang terjadi di lingkungan Polda Lampung dan jajaran.  
(giat3089/progDukma/SP6/SS5/IKP5).

**32) meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(149)mengaktifkan evaluasi terhadap LHKPN.  
(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP11/PPK prog15, giat 49, renaksi 163,164,165);

(150)melanjutkan pembinaan pembangunan Zona Integritas.  
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKU5);

(151)mengoptimalkan kegiatan catatan atas laporan keuangan satker;  
(giat3068/progDukma/SP6/SS5/IKU11);

(152)melanjutkan kegiatan audit kinerja terhadap penganggaran keuangan, operasional, pembinaan dan penyelenggaraan dan pemeliharaan sarpras;  
(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKU11);

**33) meningkatkan tatakelola manajemen perencanaan dan penganggaran Polri yang akuntabel;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(153)mengoptimalkan pembinaan perencanaan kinerja dan anggaran;  
(giat5054/progDukma/SP6/SS5/IKU13);

(154)meningkatkan dalam pembinaan pengendalian kinerja dan anggaran.  
(giat5054/progDukma/SP6/SS5/IKU13);

(155)meningkatkan kualitas dalam pelaporan pertanggung jawaban keuangan.  
(giat3068/progDukma/SP6/SS5/IKU13);

(156)meningkatkan penatakelolaan dalam manajemen perencanaan dan pengendalian anggaran.  
(giat3054/progDukma/SP6/SS5/IKU11);

(157)melanjutkan pembinaan HTCK pada SOTK Polres dan Polsek sesuai dengan Perpol Nomor 2 tahun 2021;  
(giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKU7);

(158)meningkatkan pembinaan terhadap fungsi keuangan jajaran Polda Lampung melalui Rapat kerja teknis, supervisi, dan asisitensi pada Subbagrenmin dan Sium Polres;  
(giat3073/progDukma/SP5/SS5/IKP7);

**34) menata kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polda agar efektif dan efisien sesuai dengan peta Proses Bisnis Polri;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(159)mengusulkan pembentukan Polsubsektor dan Polsek.  
(giat5054/progDukma/SP6/SS5/IKU7);

(160)mengusulkan perubahan tipologi kesatuan Polsek dan Polres.  
(giat5054/progDukma/SP6/SS5/IKU7);

(161)melakukan penataan daerah hukum Polres dan Polsek.  
(giat5054/progDukma/SP6/SS5/IKU7);

(162)melakukan analisa dan evaluasi organisasi Polres  
(giat5054/progDukma/SP6/SS5/IKU7);

(163)Meningkatkan pembinaan terhadap fungsi Setum jajaran Polda Lampung melalui Rapat kerja teknis, supervisi, dan asisitensi pada Subbagrenmin dan Sium Polres;  
(giat3073/progDukma/SP5/SS5/IKP7);

**35) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polda Lampung;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:

(164)menyelenggarakan kegiatan *road map* Reformasi Birokrasi Polri, yang berfokus pada birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.  
(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKU7);

(165)menyelenggarakan penguatan dalam kegiatan reformasi birokrasi Polri melalui asistensi, rapat teknis, dan pemberian petunjuk dan arahan.

(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKU7);

(166)melanjutkan pembangunan zona integritas pada satuan kerja di lingkungan Polda Lampung dan jajaran menuju WBK;

(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKU7);

(167)Pembinaan dalam penyelenggaraan inovasi pelayanan publik (Sinovik);

(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKU7).

#### **IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Polda Lampung T.A. 2024**

##### **1. Program dan Kegiatan**

###### **a. Program Dukungan Manajemen.**

1) Tujuan:

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektor.

2) Kegiatan:

- a) pelayanan administrasi keuangan Polri (3068);
- b) penerangan masyarakat (3070);
- c) penyelenggarakan Teknologi Informasi (4071);
- d) pelayanan kesehatan Polri (3072);
- e) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;(3073);
- f) pertanggungjawaban profesi (3088);
- g) penyelenggarakan pengamanan internal Polri;(3089);
- h) penegakkan tata tertib dan disiplin Polri (3090);
- i) penyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan (3091);
- j) pengelolaan multimedia;(3149);
- k) pemberian bantuan dan nasehat hukum (3154);
- l) penyusunan dan penyuluhan hukum (3155);
- m) penyusunan kebijakan Polri (5051);
- n) penata kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri (5052);
- o) reformasi Birokrasi Polri (5053);
- p) manajemen Anggaran (5054);
- q) pengelola Informasi dan Dokumentasi (5056).

###### **b. Program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri.**

1) Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi sarana dan prasarana aparatur Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi pembinaan dan operasional;

2) Kegiatan:

- a) pengembangan peralatan Polri (3084);
- b) dukungan manajemen dan teknik Sarpras (5059);
- c) pengembangan fasilitas dan konstruksi (5062).

**c. Program Profesionalisme SDM Polri.**

1) Tujuan:

Terwujudnya postur SDM Polri yang profesional, modern dan terpercaya berdasarkan kompetensi dan kinerja yang optimal melalui infrastruktur SDM yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggung jawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan *value* organisasi.

2) Kegiatan

- a) dukungan Manajemen profesionalisme SDM Polri (3096);
- b) penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri (3100);
- c) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri (3105);
- d) pengendalian pegawai Polri (3107)
- e) pembinaan karier personel Polri (3108);
- f) pelayanan psikologi anggota Polri (3110).

**d. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.**

1) Tujuan:

Terpelihara Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta integrasi lintas sektoral yang fokus pelaksanaan tugas fungsi preemtif dan preventif;

2) Kegiatan:

- a) analisis keamanan (3112);
- b) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik (3114);
- c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi (3155);
- d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya (3116);
- e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara (3117);
- f) Kerjasama keamanan dan ketertiban K/L (3120);
- g) Dukungan manajemen pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (3128);
- h) Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (3130);
- i) Penyelenggaraan pengamanan obyek vital (3131);
- j) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang lalulintas (3133);

- k) penyelenggaraan kepolisian perairan (3134);
- l) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus (3150);
- m) pembinaan potensi keamanan (5076);
- n) pengendalian operasi kepolisian (5080);
- o) pelacakan dan penangkapan keamanan dan ketertiban (5081) dan;
- p) penanggulangan keamanan dalam negeri (5087).

**e. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.**

1) Tujuan: `

Terwujudnya stabilitas politik dan keamanan melalui penegakkan hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel serta menjunjung tinggi Hak asasi manusia.

2) Kegiatan:

- a) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (3137);
- b) Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (3140)
- c) penindakan tindak pidana umum (3142);
- d) penindakan tindak pidana narkoba (3144);
- e) penindakan tindak pidana ekonomi khusus (3145);
- f) penindakan tindak pidana korupsi (3146);
- g) penindakan tindak pidana siber (3151);
- h) penindakan tindak pidana perairan (4342);
- i) penindakan tindak pidana laka lantas (4343);
- j) penindakan tindak pidana tertentu (5083);
- k) koordinasi dan pengawasan PPNS (5085) dan;
- l) pengawasan penyidikan (5086).

**2. Pagu Indikatif Polda Lampung T.A. 2024.**

Alokasi Pagu indikatif Polda Lampung T.A. 2024 adalah sebesar **Rp.1.374.036.878.000,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh empat milyar tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)** dengan perincian komposisi kebutuhan anggaran sebagai berikut:

a. Rincian Alokasi Pagu Indikatif T.A. 2024 berdasarkan Jenis Belanja sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai Rp. 895.273.254.000,-
- 2) Belanja Barang Rp. 472.497.553.000,-
- 3) Belanja Modal Rp. 6.266.071.000,-

- b. Rincian Pagu Indikatif T.A. 202 berdasarkan sumber anggaran sebagai berikut:
- 1) Rupiah Murni Rp. 1.284.341.415.000,-
  - 2) PNPB Rp. 64.609.356.000,-
  - 3) BLU Rp. 25.086.107.000,-
- c. Rincian alokasi Pagu indikatif T.A. 2024 berdasarkan Program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Program Profesionalisme SDM Polri Rp.25.014.264.000,- (*dua puluh lima milyar empat belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah*) meliputi :
    - a) dukungan manajemen dan teknis pengembangan SDM Polri Rp.23.793.339.000,- (*dua puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*);
    - b) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri Rp.92.775.000,- (*sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
    - c) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri Rp.675.150.000,- (*enam ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah*);
    - d) Pembinaan karier personel Polri Rp.230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*);
    - e) pelayanan psikologi anggota Polri Rp.223.000.000,- (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*).
  - 2) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp.109.858.788.000,- (*seratus sembilan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) meliputi:
    - a) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp.35.470.519.000,- (*tiga puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah*);
    - b) penindakan Tindak Pidana Umum Rp.45.096.043.000,- (*empat puluh lima milyar sembilan puluh enam juta empat puluh tiga ribu rupiah*).
    - c) penindakan tindak pidana narkoba Rp.20.033.321.000,- (*dua puluh milyar tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

- d) penindakan tindak pidana ekonomi khusus Rp.675.490.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - e) penindakan tindak pidana korupsi Rp.4.451.008.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ribu rupiah).
  - f) penindakan tindak pidana siber Rp.1.293.048.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh delapan ribu rupiah).
  - g) penindakan tindak pidana perairan Rp.756.294.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
  - h) penindakan tindak pidana laka lantas Rp.990.004.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta empat ribu rupiah).
  - i) penindakan tindak pidana tertentu Rp.916.606.000,- (sembilan ratus enam belas juta enam ratus enam ribu rupiah).
  - j) Koordinasi dan pengawasan PPNS Rp.66.855.000,- (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
  - k) pengawasan penyidikan Rp.109.600.000,- (*seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).
- 3) Program Modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri Rp.152.562.051.000,- (*seratus lima puluh dua milyar lima ratus enam puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah*) meliputi :
- a) pengembangan peralatan Polri Rp.4.639.071.000,- (empat milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
  - b) dukungan manajemen dan Teknik Sarpras Rp.146.295.980.000,- (*seratus empat puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
  - c) pengembangan fasilitas dan konstruksi Rp.1.627.000.000,- (*satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah*)
- 4) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp.356.981.647.000,- (*tiga ratus dua milyar enam puluh*

*sembilan juta empat ratus lima ribu rupiah)* meliputi :

- a) analisis keamanan Rp. 2.820.322.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- b) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik Rp. 4.718.897.000,- (empat milyar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi Rp.4.769.281.000,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya Rp. 4.647.425.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara Rp.6.798.377.000,- (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- f) kerjasama keamanan dan ketertiban K/L Rp.49.150.000,- (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- g) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Rp.224.775.661.000,- (dua ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- h) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara Rp.10.926.136.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- i) penyelenggaraan pengamanan objek vital Rp. 10.351.882.000,- (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- j) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas Rp.15.235.578.000,- (lima belas milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- k) penyelenggaraan Kepolisian Perairan Rp.484.887.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
  - l) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus Rp.2.672.897.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
  - m) pembinaan potensi keamanan Rp.35.696.390.000,- (tiga puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - n) pembinaan operasi kepolisian Rp.23.612.110.000,- (dua puluh tiga milyar enam ratus dua belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);
  - o) pengendalian operasi kepolisian Rp.8.807.239.000,- (delapan milyar delapan ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
  - p) pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban Rp.550.494.000,- (lima ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - q) penanggulangan keamanan dalam negeri Rp.64.921.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- 5) Program Dukungan manajemen Rp.729.620.128.000,- (*tujuh ratus dua puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah*) meliputi :
- a) pelayanan administrasi keuangan Polri Rp.690.000.000,- (*enam ratus sembilan puluh juta rupiah*).
  - b) penerangan masyarakat Rp.1.299.120.000,- (*satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
  - c) penyelenggaraan teknologi informasi Rp.1.153.466.000,- (*satu milyar seratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*);
  - d) pelayanan kesehatan Polri Rp.27.491.661.000,- (*dua puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah*).
  - e) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri Rp.689.604.113.000,- (*enam ratus delapan puluh sembilan*

*milyard enam ratus empat juta seratus tiga belas ribu rupiah);*

- f) pertanggungjawaban profesi Rp.1.073.758.000,- (*satu milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);*
- g) penyelenggaraan pengamanan internal perkantoran Rp.918.753.000,- (*sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);*
- h) penegakkan tata tertib dan disiplin Polri Rp.371.754.000,- (*tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);*
- i) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan Rp.1.510.965.000,- (*satu milyar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);*
- j) pengelolaan multimedia Rp.25.489.000,- (*dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);*
- k) pemberian bantuan dan nasehat hukum Rp.1.563.914.000,- (*satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);*
- l) penyusunan dan penyuluhan hukum Rp.264.000.000,- (*dua ratus enam puluh empat juta rupiah);*
- m) penyusunan kebijakan Polri Rp.127.500.000,- (*seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);*
- n) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri Rp.131.350.000,- (*seratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);*
- o) Reformasi Birokrasi Polri Rp.705.057.000,- (*tujuh ratus lima juta lima puluh tujuh ribu rupiah);*
- p) manajemen anggaran Rp.2.640.728.000,- (*dua milyar enam ratus empat puluh juta tujuh dua puluh delapan ribu rupiah);*
- q) pengelolaan informasi dan dokumentasi Rp.48.500.000,- (*empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).*

### **3. Kegiatan yang berdasarkan usulan Pagu Indikatif Polda Lampung T.A. 2024.**

- a. mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan

termasuk tunjangan kinerja, termasuk dari pemenuhan *Intake* Polri tahun 2024, usulan kenaikan ini termasuk untuk penambahan tunjangan kinerja sampai dengan 80%;

- b. kegiatan operasional anggaran perkantoran (antara lain: biaya pemeliharaan, BMP, dukungan kesehatan, harwat dan makan tahanan, pemeliharaan dan perawatan *Command Center*, kebutuhan werving Diktuk, daya dan jasa serta keperluan sehari-hari perkantoran);
- c. kegiatan fungsi teknis kepolisian, berupa: deteksi aksi dan deteksi dini dari potensi gangguan keamanan, pencegahan dan penanggulangan keamanan, pembinaan pelayanan dan perlindungan masyarakat, penegakkan hukum, pengamanan kegiatan masyarakat baik skala provinsi dan nasional, pengamanan tahapan Pemilu 2024 serta untuk mendukung tercapainya proyek prioritas nasional tahun 2024 di Polda Lampung;
- d. penguatan sarana prasarana dalam rangka peningkatan profesionalisme SDM Polri, meningkatkan pelayanan publik Polri, penanganan gejala/ konflik sosial, penanganan "*flash point*", terorisme, penyebaran berita *hoax* dan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, siber dan penanganan peristiwa yang berimplikasi kontinjensi, Alamsus dalam mendukung Pemilu 2024, pemenuhan fasilitas kantor kesatuan baru di lingkungan Polda Lampung, dan pembangunan perumahan negara bagi personel Polri untuk kesatuan baru;
- e. melaksanakan pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapabilitas personel Polri baik di bidang fungsi pembinaan maupun operasional dalam mendukung transformasi Polri yang presisi;
- f. meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif secara maksimal dengan mengoptimalkan petugas Bhabinkamtibmas melalui "*strategi Polmas*" dengan penerapan "*polisi RW*" dalam mewujudkan *cooling system*;
- g. meningkatkan kegiatan pemulihan ekonomi nasional dan proyek nasional termasuk keamanan laut pada poros maritim dengan memperkuat satuan Polairud baik di tingkat Polda maupun Polres;
- h. meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat dan jam rawan gangguan Kamtibmas serta diwilayah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional;

- i. melaksanakan sosialisasi, penyusunan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Polri serta pemberian advokasi terhadap institusi Polri, anggota Polri maupun keluarga Polri dan masyarakat;
- j. mengakomodir kegiatan Program Quick wins Presisi yang terdiri dari:
  - 1) program membangun budaya integritas organisasi;
  - 2) program menerapkan sistem Pemolisian Berbasis Digital;
  - 3) program mengembangkan SDM unggul;
  - 4) program menciptakan suasana kondusif dimasyarakat (*cooling system*);
  - 5) program memantapkan pemeliharaan Kamtibmas;
  - 6) program mengoptimalkan penegakkan hukum hukum;
  - 7) meningkatkan pelayanan publik;
  - 8) mengoptimalkan pengawasasn;

#### IV. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Kepolisian Daerah Lampung T.A. 2024 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Polda Lampung dan jajaran pada T.A. 2024.

Ditetapkan di : Lampung Selatan  
pada tanggal : 3 Juli 2023

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



  
HELMY SANTIVA, S.P., S.I.K., M.Si.  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)  
POLDA LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**RENCANA KERJA TAHUNAN POLDA LAMPUNG 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0.	Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.	Indeks keamanan dan ketertiban	3,5	
1.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang partisipatif	Indeks pemeliharaan kamtibmas	75	
2.	Penegakkan hukum yang berkeadilan	Indeks penegakkan hukum	70	
3.	Sumber daya manusia yang profesional	Indeks profesionalitas personel	74	
4.	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan	a. Indeks dukungan sarana prasarana dan peralatan	70,5	
		b. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	2,5	
		c. Nilai pengelolaan informasi pemberitaan	72	
5.	Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel.	a. Indeks penguatan implementasi kebijakan	75	
		b. Indeks tata kelola kepolisian	5,5	
		c. Indeks kepuasan layanan kepolisian	83	
		d. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	78	
		e. Persentase penyelesaian pelanggaran personel	88	
		f. Persentase penyelesaian masalah hukum	91,2	
		g. Nilai kinerja anggaran.	80	

Ditetapkan di: Lampung Selatan  
pada tanggal : 3 Juli

2023

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**



**HELMY SANTIKA, S.H., S.IK., M.Si.**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI**

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)  
POLDA LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**REKAP 1: K/L**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

1. **KEMENTERIAN/LEMBAGA** : **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
 2. **VISI** : **Terwujudnya Daerah hukum Polda Lampung yang Aman dan Tertib**  
 3. **MISI** : **Melindungi, mengayomi, dan Melayani Masyarakat**  
 4. **PRIORITAS NASIONAL**

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2024 (RIBU)
02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	0,0
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	0,0
Total		0,0

**5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L**

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
0.0	Keamanan dan Ketertiban yang kondusif		43.023.844,00
01.01	Indeks Keamanan dan Ketertiban	3,5	
01	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang partisipatif		405.678.174,00
01.01	Indeks pemeliharaan kamtibmas	75	
02	penegakkan hukum yang berkeadilan		677.276.863,00
02.01	Indeks penegakkan hukum	70	
03	SDM yang profesional		
03.01	Indeks profesionalitas personel	74	36.769.704,00
04	Modernisasi sarana dan prasarana kepolisian yang berkelanjutan		
04.01	Indeks dukungan sarana prasarana dan peralatan	70,5	151.941.304,00
04.02	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	2,5	329.489,00
04.03	Nilai pengelolaan informasi pemberitaan	72	685.909,00
05	Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel		
05.01	Indeks penguatan implementasi kebijakan	75	127.500,00
05.02	Indeks tata kelola Kepolisian	5,3	772.698,00
05.03	Indeks kepuasan pelayanan Kepolisian	83	26.355.209,00
05.04	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	78	18.259.863,00
05.05	Persentase penyelesaian pelanggaran personel	88	6.873.342,00
05.06	Persentase penyelesaian masalah hukum	91,2	2.666.759,00
05.07	Nilai kinerja anggaran	80	3.276.220,00
Total			1.374.036.878,00

**6. PROGRAM DAN PENDANAAN**

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
060.BD	Program Profesionalisme SDM Polri	25.014.264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.014.264,0
060.BI	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	108.859.784,0	999.004,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109.858.788,0
060.BP	Program odernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	122.140.759,0	24.182.053,0	6.239.239,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152.562.051,0
060.BQ	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	320.039.731,0	36.941.916,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356.981.647,0
060.WA	Program Dukungan Manajemen	708.203.048,0	2.570.212,0	18.846.868,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	729.620.128,0
<b>Total</b>		<b>1.284.341.415,0</b>	<b>64.606.358,0</b>	<b>25.086.107,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.374.036.878,0</b>						

Lampung Selatan, Juli 2023  
**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**  
  
**HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K., M.Si.**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI**

**REKAP 2: K/L**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

1. **KEMENTERIAN/LEMBAGA** : **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
 2. **SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG** : **01- Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang partisipatif**  
 3. **PROGRAM** : **Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**  
 4. **PRIORITAS NASIONAL**

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2024 (RIBU)
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	0,0
07.05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	0,0
Total		0,0

**5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKU)**

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
04	Terjaganya ketertiban sosial dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan		356.981.647,0
04.01	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	1.845	
04.02	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat bidang politik	1.892	
04.03	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat bidang ekonomi	735	
04.04	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat bidang sosial budaya	638	
04.05	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat bidang keamanan negara	2.110	
04.06	Kerjasama dalam negeri	5	
04.07	Layanan dukungan manajemen internal	181	
04.08	Operasi bidang keamanan fungsi sabhara	83.014	
04.09	Operasi bidang keamanan fungsi Pamobvit	11.003	
04.10	Operasi bidang keamanan fungsi Lantas	1.368	
04.11	Operasi bidang keamanan fungsi Polair	553	
04.12	Kebijakan bidang pertahanan dan keamanan	90	
04.13	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	122.388	
04.14	Operasi bidang keamanan pemilu	36	
04.15	Layanan patroli satwa	1.095	
04.16	Kesiapan keamanan pers dalam penanggulangan gangguan Kamdagri berintensitas tinggi	12	
Total			356.981.647,0

## 6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	layanan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	356.981.647,0
01.01	Indeks Harkamtibmas	
Total		356.981.647,0

## 7. KEGIATAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3112	Analisis Keamanan	2.820.322,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.820.322,0
3114	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik	4.489.666,0	229.231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.718.897,0
3115	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi	4.558.752,0	210.529,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.769.281,0
3116	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya	4.418.194,0	229.231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.647.425,0
3117	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara	6.580.448,0	217.929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.798.377,0
3120	Kerjasama Keamanan dan Ketertiban K/L	49.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49.150,0
3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	222.167.052	2.608.609,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224.775.661,0
3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	2.993.080,0	7.933.056,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.926.136,0
3131	Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital	691.254,0	9.660.628,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.351.882,0
3133	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lintas	25.000,0	15.210.578,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.235.578,0
3134	Penyelenggaraan Kepolisian Perairan	329.762,0	155.125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	484.887,0
3150	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Khusus	2.672.897,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.672.897,0
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	35.427.219,0	269.171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.696.390,0
5079	Pembinaan operasi Kepolisian	23.612.110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.612.110,0
5080	Pengendalian Operasi Kepolisian	8.807.239,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.807.239,0
5081	Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban	550.494,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550.494,0
5087	Penanggulangan Keamanan dalam Negeri	64.921,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64.921,0
Total		320.257.560,0	36.724.087,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356.981.647,0

Lampung Selatan, Juli 2023

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



**REKAP 2: K/L  
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. **KEMENTERIAN/LEMBAGA** : **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
 2. **SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG** : **02 - Penegakkan hukum yang berkeadilan**  
 3. **PROGRAM** : **Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana**  
 4. **PRIORITAS NASIONAL**

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2024 (RIBU)
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	0,0
07.05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	0,0
Total		0,0

**5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)**

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
02	terciptanya keadilan penegakkan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi		109.858.788,0
02.01	Layanan dukungan manajemen internal	72	
02.02	Penanganan perkara tindak pidana umum.	2.236	
02.03	Penanganan perkara tindak pidana narkoba	425	
02.04	Penanganan perkara tindak pidana ekonomi khusus	37	
02.05	Penanganan perkara tindak pidana korupsi	25	
02.06	Penanganan perkara tindak pidana siber	76	
02.07	Penanganan perkara tindak pidana perairan	40	
02.08	Penanganan perkara tindak pidana lalu lintas	759	
02.09	Penanganan perkara tindak pidana tertentu	63	
02.10	Layanan dukungan manajemen audit kinerja	32	
Total			109.858.788,0

**6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM**

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2024 (RIBU)
02	layanan penegakkan hukum oleh Polri	109.858.788,0
02.01	Indeks Penegakkan hukum Polri	
Total		109.858.788,0

**7. KEGIATAN PENDANAAN**

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3137	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	35.470.519,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.470.519,0
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	45.096.043,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45.096.043,0
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	20.033.321,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.033.321,0
3145	Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus	675.490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675.490,0
3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	4.451.008,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.451.008,0
3151	Penindakan Tindak Pidana Siber	1.293.048,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.293.048,0
4342	Penindakan Tindak Pidana Perairan	756.294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	756.294,0
4343	Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas	990.004,0	990.004,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990.004,0
5083	Penindakan Tindak Pidana Tertentu	916.606,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	916.606,0
5085	Koordinasi dan Pengawasan PPNS	66.855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66.855,0
5086	Pengawasan Penyidikan	109.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109.600,0
Total		108.868.784,0	990.004,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109.858.788,0

Lampung Selatan, Juli 2023  
**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**  
  
**HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K., M.Si.**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI**



**REKAP 2: K/L**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

1. **KEMENTERIAN/LEMBAGA** : **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
 2. **SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG** : **03 – Sumber daya manusia yang profesional**  
 3. **PROGRAM** : **Program Profesionalisme SDM Polri**  
 4. **PRIORITAS NASIONAL**

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2024 (RIBU)
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	0,0
07.05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	0,0
Total		0,0

**5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)**

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Terpenuhinya SDM Polri yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional		25.014.264,0
01.01	Layanan dukungan manajemen internal	48	
01.02	Pelatihan bidang pertahanan dan keamanan	75	
01.03	Layanan manajemen SDM internal	12	
01.04	Layanan pembinaan karier pegawai pada Polri	20	
01.05	Layanan psikologi Polri	12	
Total			25.014.264,0

**6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM**

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	SDM Polri yang Kompeten	25.014.264,0
01.01	Persentase SDM Polri yang memenuhi kompetensi minimal	
Total		25.014.264,0

**7. KEGIATAN PENDANAAN**

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3096	Dukungan Manajemen dan Teknis Profesionalisme SDM Polri	23.793.339,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.793.339,0
3100	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri	92.775,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92.775,0
3105	Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri	675.150,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675.150,0

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3108	Pembinaan Karier Personel Polri	230.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230.000,0
3110	Pelayanan Psikologi Anggota Polri	223.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223.000,0
	<b>Total</b>	<b>25.014.264,00</b>	<b>0,0</b>	<b>25.014.264,0</b>								

Lampung Selatan, Juli 2023  
**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**  
  
**HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K., M.Si.**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI**



**REKAP 2: K/L**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

1. **KEMENTERIAN/LEMBAGA** : **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
 2. **SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG** : **04 - Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan**  
 3. **PROGRAM** : **Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri**  
 4. **PRIORITAS NASIONAL**

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2024 (RIBU)
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	0,0
07.05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	0,0
Total		0,0

**5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)**

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
03	terselenggaranya operasional Polri yang optimal dalam pelaksanaan harkamtibmas dan gakkum serta Layanan Internal		152.562.051,0
03.01	Sarana bidang pertahanan dan keamanan	192	
03.02	Layanan dukungan manajemen internal	12	
03.03	Prasarana bidang pertahanan dan keamanan	1	
Total			152.562.051,0

**6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM**

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2024 (RIBU)
03	Almatsus dan Sarpras	152.562.051,0
03.01	persentase pemenuhan Almatsus dan Sarpras	
Total		152.562.051,0

**7. KEGIATAN PENDANAAN**

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3084	Pengembangan Peralatan Polri	0,0	361.295,0	4.277.776,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.639.071,0
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	122.140.759,0	23.820.758,0	334.463,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146.295.980,0
5062	Pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri	0,0	0,0	1.627.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.627.000,0
	<b>Total</b>	<b>122.140.759,0</b>	<b>24.182.053,0</b>	<b>6.239.239,0</b>	<b>0,0</b>	<b>152.562.051,0</b>						

Lampung Selatan, Juli 2023  
**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**  
  
**HELMY SANTIKA, S.H., S.I.K., M.Si.**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI**



**REKAP 2: K/L**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

1. **KEMENTERIAN/LEMBAGA** : **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
 2. **SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG** : **05 - Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel**  
 3. **PROGRAM** : **Program Dukungan Manajemen**  
 4. **PRIORITAS NASIONAL**

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2024 (RIBU)
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	0,0
07.05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	0,0
Total		0,0

**5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)**

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
05	terselenggaranya dukungan manajemen kepada internal Polri yang memenuhi standar pelayanan		729.620.128,0
05.01	Layanan manajemen kinerja internal keuangan	12	
05.02	Layanan manajemen internal hubungan masyarakat	246	
05.03	Layanan manajemen internal Teknologi Informasi	12	
05.04	Layanan manajemen internal Kesehatan Polri	180	
05.05	Layanan dukungan manajemen internal	12	
05.06	Layanan dukungan manajemen fungsi pengamanan internal	72	
05.07	Layanan audit internal	664	
05.08	Layanan dukungan manajemen penegakkan tata tertib dan disiplin Polri	116	
05.09	Layanan dukungan manajemen pengawasan dan pemeriksaan	24	
05.10	Layanan dukungan manajemen pengelolaan multimedia	12	
05.11	Layanan dukungan manajemen pemberian bantuan dan nasehat hukum	23	
05.12	Sosialisasi dan diseminasi bidang hukum	4.504	
05.13	Layanan dukungan manajemen penyusunan kebijakan Polri	8	
05.14	Layanan dukungan manajemen penyusunan penata kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri	4	
05.15	Layanan dukungan manajemen penyusunan bidang Reformasi Birokrasi Polri	49	
05.16	Layanan dukungan manajemen internal anggaran Polri	197	
05.17	Layanan dukungan manajemen internal pengelolaan informasi dan dokumentasi	2	

Total	729.620.128,0
-------	---------------

## 6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2024 (RIBU)
05	layanan kepada internal Polri	729.620.128,0
05.01	Jumlah layanan yang diberikan sesuai SOP	
Total		729.620.128,0

## 7. KEGIATAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3068	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri	610.000,0	80.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	690.000,0
3070	Penerangan Masyarakat	1.299.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.299.120,0
3071	Penyelenggaraan Teknologi Informasi	1.153.466,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.153.466,0
3072	Pelayanan Kesehatan Polri	6.163.581,0	2.481.212,0	18.846.868,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.491.661,0
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	689.532.113,0	72.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	689.604.113,0
3088	Pertanggungjawaban Profesi	1.073.758,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.073.758,0
3089	Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri	918.753,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	918.753,0
3090	Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri	371.754,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371.754,0
3091	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan	1.510.965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.510.965,0
3149	Pengelolaan Multimedia	25.489,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.489,0
3154	Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum	1.563.914,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.563.914,0
3155	Kerjasama dan Penyuluhan Hukum	264.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264.000,0
5051	Penyusunan Kebijakan Polri	127.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127.500,0
5052	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polri	131.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131.350,0
5053	Reformasi Birokrasi Polri	705.057,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	705.057,0
5054	Manajemen Anggaran	2.560.728,0	80.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.640.728,0
5056	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	48.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48.500,0
Total		1.284.341.415,0	64.609.356,0	25.086.107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.374.036.878,0





**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH LAMPUNG**

Jl. Terusan Ryacudu No. 1 Jati Agung Lampung Selatan Kode Pos 35365  
*email* : [birorenalampung@gmail.com](mailto:birorenalampung@gmail.com)